



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 46 Volume 12 Juni 2016



KPK Siap Beri Pendampingan pada Proyek-Proyek Ketenagalistrikan

**Pastikan Keandalan Pasokan Daya Listrik,
Dirjen Ketenagalistrikan Kunjungi Nias**

Sambungan Baru Paling Lama 25 Hari

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

mendukung Zona Integritas

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

serta

Wilayah Bebas dari Korupsi



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan

Jakarta Selatan 12950

Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044

www.djk.esdm.go.id



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 46 Volume 12 |

JUNI 2016

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Totoh Abdul Fatah
Wiwid Mulyadi
Heru Setiawan
Ear Marison
Hagni Surendro
Sudarti
Jackson Frans
Fathorrahman
Hari Dwi Wijayanto
Pandu Satria Jati B
Anggita Miftah Hairani
David F Silalahi
Ahmad Amiruddin
Miftah Haris
Novan Akhriyanto
Dina Andriani
Hening Surya Bayu A.
Fanny Ristantono
M. Tomas Triananta

Penyunting/ Editor

Hutami Hikma Asih
Ernawaty
Sahri Mahmud
Ridwan Budi Santoso

Desain Grafis/ Fotografer

Achmad Yusuf Haryono
Agus Supriyadi
Ajat Munajat
Agah Muhammad Abduh
Adar

Sekretariat

Emi Tursilah
Irman Suryana
Novi Pravitasari
Lutfhi
Dewi Agustini

Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.djk.esdm.go.id

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Masyarakat kini lebih mudah mendapat sambungan baru tenaga listrik. Layanan satu pintu sambungan listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Topik mengenai hal ini kami angkat menjadi Tajuk Utama.

Pembaca diajak untuk lebih mengenal ASEAN Power Grid dalam Liputan Khusus, termasuk mengenai latar belakang dan proyeksinya ke depan. ASEAN Power Grid dibentuk untuk meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN serta meningkatkan ketahanan energi regional.

Topik mengenai subsidi listrik dan Program 35.000 MW juga masih menjadi sorotan. Topik lainnya yang dibahas dalam edisi ini antara lain mengenai rangkaian koordinasi dan supervisi KPK di sektor ketenagalistrikan serta rencana pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah timur Indonesia. Dalam rubrik Galeri ditampilkan pelantikan 28 PNS baru Ditjen Ketenagalistrikan dan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi pegawai sesuai dengan pengabdianya.

Selamat membaca!

Salam Redaksi

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat Teknis :

1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

Syarat Umum:

1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke humas.djk@gmail.com
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan *caption*
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

DAFTAR ISI



27

KPK Siap Beri Pendampingan pada Proyek-Proyek Ketenagalistrikan

Dari Redaksi

Tajuk Utama

- 6 Masyarakat Semakin Mudah Sambung Listrik
- 8 Sambungan Baru Paling Lama 25 Hari
- 10 YLKI: Revolusi Mental di Sektor Ketenagalistrikan Sudah Ada Sejak Dulu
- 11 SLO Online Dipamerkan dalam Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik

Liputan Khusus

- 12 Mengenal *ASEAN Power Grid*

Warta Kita

- 16 Subsidi Listrik Harus Tepat Sasaran
- 17 Subsidi Listrik Tepat Sasaran Perlu Dukungan Banyak Pihak
- 18 Subsidi Listrik Tepat Sasaran agar Listrik Dinikmati Merata
- 20 Pemerintah Cari Solusi Masalah Energi di Nusa Tenggara
- 22 Enam Provinsi Jadi Pilot Project Program Indonesia Terang
- 23 Program 35.000 MW dan Indonesia Terang Butuh Dukungan Pemda
- 24 Tiga Cara Melistriki Daerah Timur Indonesia
- 26 KPK Kawal Ketahanan Energi
- 27 KPK Siap Beri Pendampingan pada Proyek-Proyek Ketenagalistrikan
- 28 Korsup KPK di Surabaya, Dirjen Ketenagalistrikan Harapkan Kerjasama Pemda
- 29 Narasi Tunggal Penting dalam Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah
- 32 PLTB Terbesar di Indonesia Siap Dibangun
- 33 Pemerintah Minta PLN Tingkatkan Efisiensi

- 35 Program 35.000 MW Perwujudan Nawa Cita
- 37 Teten Masduki: 35.000 MW Satu-Satunya di Dunia
- 38 Pemerintah Bertekad Kurangi BBM dalam Pembangkit Listrik
- 39 Delegasi Malaysia Kunjungi Calon Tapak GI Perawang
- 40 Hindari Bahaya, Instalasi Listrik Harus Sesuai PUIL 2011
- 42 Inspektur Ketenagalistrikan Diharap Terus Tingkatkan Kompetensi
- 45 Pemerintah Minta PLN Tinjau Kontrak PLTD Sewa
- 46 Pastikan Keandalan Pasokan Daya Listrik, Dirjen Ketenagalistrikan Kunjungi Nias
- 48 Dirjen Ketenagalistrikan Dampingi Menteri KeTTHA Malaysia Kunjungi Bengkayang
- 52 Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Pembukaan The 3rd ISES 2016
- 54 Ditjen Ketenagalistrikan Meriahkan Pekan Inovasi Sumut
- 56 Kebijakan Pelayanan Ketenagalistrikan Disosialisasikan di Makassar

Galeri

- 30 Dirjen Ketenagalistrikan Ambil Sumpah Jabatan 28 PNS

Resensi

- 44 - *American Electricians' Handbook*
- Jelajah Wisata Nusantara

Tips

- 50 Tips Membuat Presentasi yang Efektif

Pojok Peraturan

- 58 Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Bulan Januari - Juni 2016



SLO Online Dipamerkan dalam Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik



Pemerintah Cari Solusi Masalah Energi di Nusa Tenggara



Hindari Bahaya, Instalasi Listrik Harus Sesuai PUIL 2011



Inspektur Ketenagalistrikan Diharap Terus Tingkatkan Kompetensi

MASYARAKAT *SEMAKIN MUDAH* SAMBUNG LISTRIK

Penyambungan listrik kini dipermudah dengan diterapkannya layanan satu pintu. Dengan layanan ini, masyarakat hanya perlu menghubungi PLN melalui PLN 123 atau website PLN untuk mendapatkan sambungan listrik. Hal tersebut dikemukakan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dalam acara *coffee morning* bertajuk Pelayanan Satu Pintu Sambungan Listrik pada Jumat (29/4) bertempat di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta.

"Jadi layanan satu pintu ini pada prinsipnya adalah menggabungkan database 123 PLN dengan database LIT-TR (Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah) secara online dan juga database SLO (Sertifikat Laik Operasi) di Ditjen Ketenagalistrikan. Sehingga masyarakat hanya melalui satu pintu saja saat menyambung listrik termasuk biaya pembayarannya juga," jelas Jarman.

Jarman mengatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyampaikan surat kepada direksi PLN agar layanan satu pintu ini bisa diimplementasikan tahun ini. Disampaikan Jarman, bulan April 2016 layanan ini baru dapat diaplikasikan di Jakarta dan Surabaya karena

kedua kota tersebut sudah siap sistemnya. Akhir tahun ini layanan satu pintu ini diharapkan sudah dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

Jangka waktu maksimum layanan penyambungan listrik dibedakan menjadi tiga, yakni 5 hari kerja tanpa perluasan jaringan, 15 hari kerja dengan perluasan jaringan, dan 25 hari kerja jika ada penambahan trafo. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah ini menjadi salah satu indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PLN.

Artinya, jika kecepatan penyambungan lebih lama dari yang sudah ditetapkan, maka PLN harus memberikan potongan tagihan listrik sebesar 35% dari biaya beban atau biaya minimum untuk pelanggan nonsubsidi dan 20% untuk pelanggan subsidi.

Jarman melanjutkan bahwa sistem online satu pintu ini memangkas prosedur yang dulu lima menjadi hanya tiga prosedur. Jika sistem yang lama secara manual punya waktu maksimum penyambungan 79 hari kerja, sistem yang baru ini mempersingkat menjadi 25 hari kerja. Jarman



Coffee morning diadakan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah pada para stakeholder.



Peserta coffee morning merupakan stakeholder di sektor ketenagalistrikan.

Tajuk Utama



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dalam coffee morning (29/4) mengungkapkan bahwa penyambungan listrik dipermudah dengan diterapkannya layanan satu pintu.



Sesi tanya-jawab dimanfaatkan oleh peserta coffee morning untuk mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapat.



Coffee morning menjadi media efektif yang dapat menjadi jembatan penghubung antara pemerintah, PLN, dan stakeholder.

menambahkan, masyarakatpun diuntungkan dengan biaya penyambungan yang lebih rendah 20% dari sistem yang lama.

Kebijakan layanan satu pintu penyambungan listrik ini dibuat selaras dengan komitmen pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sambungan listrik. Jarman menyampaikan hasil survey dari *World Bank* dimana tingkat *getting electricity* Indonesia naik peringkat di tahun 2015 menjadi 45 dari tahun sebelumnya yang berada pada urutan 161 dari total 189 negara yang disurvei.

Tahun ini, Jarman menambahkan, jika tidak ada inovasi yang dilakukan, peringkat *getting electricity* Indonesia bisa turun ke 46. Padahal Presiden Joko Widodo menargetkan *getting electricity* Indonesia bisa berada di posisi 20 besar. Target ini tentu merupakan tanggung jawab berat dan tidak mudah, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, serta upaya inovatif seperti layanan satu pintu ini agar target dapat tercapai. (AMH)



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman berharap pada Hari Listrik Nasional pada Oktober nanti, Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

SAMBUNGAN BARU PALING LAMA 25 HARI

Masyarakat akan lebih mudah mendapat sambungan baru tenaga listrik. Dengan kebijakan satu pintu sambungan listrik, masyarakat paling lama akan mendapatkan listrik 25 hari sejak pendaftaran. Jika tanpa perluasan jaringan, lama penyambungan listrik bahkan hanya lima hari. Selain waktu penyambungan yang akan dipercepat, prosedur juga akan dipermudah.

Sesuai aturan baru, kecepatan penyambungan baru tenaga listrik merupakan indikator baru pinalti Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Satya Zulfanitra saat menyampaikan presentasi mengenai Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2016, Jumat (29/4). Sesuai aturan tersebut, selain kecepatan penyambungan listrik, lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya, kesalahan

pembacaan KWH Meter, dan waktu koreksi kesalahan rekening merupakan indikator pinalti jika PT PLN (Persero) tidak sesuai dengan poin yang dideklarasikan.

Menurut Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman, apabila PLN melebihi batas waktu pelayanan yang telah ditetapkan, maka masyarakat ataupun swasta akan mendapatkan diskon hingga 35 persen. PLN pun akan mendapatkan denda apabila target waktu ini tidak terpenuhi.

"PLN akan berikan diskon 35 persen. Katakanlah dia *apply* bulan April, ternyata lebih 25 hari kerja. Pada bulan Juni dia dapat diskon dan PLN kena penalti," ungkap Jarman. Untuk itu, masyarakat pun diminta untuk aktif memberikan informasi apabila PLN tidak gagal mencapai target waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan sambungan listrik, Kementerian ESDM meluncurkan kebijakan Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik. Untuk bulan ini akan diterapkan di Jakarta dan Surabaya. Secara bertahap, seluruh masyarakat akan merasakan sambungan satu pintu sebelum Hari Listrik Nasional, Oktober 2016.

Tajuk Utama



Seorang peserta coffee morning bertanya seusai presentasi paparan materi.

"Diharapkan pada Hari Listrik Nasional bulan Oktober sudah seluruh Indonesia, kecuali untuk daerah *remote* yang memang susah secara geografis," tutupnya.

Menurut Jarman, masyarakat yang meminta sambungan listrik cukup mendaftar secara online melalui website PLN di pln.go.id atau menghubungi contact center PLN di nomor 123. Tak perlu lagi mendatangi berbagai kantor instansi. Menurut Kepala Divisi PT PLN (Persero), Benny Marbun, saat memasukan data (*entry data*), pemohon tinggal menunjuk koordinat lokasi untuk penyambungan listrik. Pembayaran biaya sambungan dan biaya pemeriksaan dilakukan melalui bank, tidak dibayar melalui tatap muka dengan petugas PLN atau petugas pemeriksa. Setelah itu pemohon tinggal menunggu saja, dalam waktu paling lama 25 hari listrik dari PLN sudah tersambung. (PSJ)



Peserta coffee morning menyimak paparan materi.



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra menjelaskan tentang Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (persero).

YLKI: Revolusi Mental di Sektor Ketenagalistrikan Sudah Ada Sejak Dulu

Tulus Abadi mengapresiasi Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik sebagai sebuah inovasi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengapresiasi terobosan yang dilakukan di sektor ketenagalistrikan melalui pemberian kompensasi kepada pelanggan listrik jika Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) tidak tercapai. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyampaikan hal tersebut dalam acara *coffee morning* di Ditjen Ketenagalistrikan, Jumat (29/4).



"Revolusi mental sudah terjadi lebih dulu di sektor ketenagalistrikan. Sejak tahun 2003 konsumen sudah mendapat kompensasi atas ketidakmampuan PLN memenuhi TMP. Belum ada organisasi pelayanan publik yang menyediakan hal seperti ini, baru listrik. Tarifnya belum tentu naik setiap tahun, tapi sudah berani memberikan kompensasi," tutur Tulus.

Ia menambahkan, meskipun kompensasi itu masih tidak terlalu besar nilainya, itu merupakan bentuk itikad baik pada konsumen. Terkait layanan satu pintu sambungan listrik, Tulus menilai itu juga merupakan sebuah revolusi karena bukan hanya menyangkut kenyamanan, namun juga transparansi. Dengan sistem online yang lebih transparan, Tulus mengungkapkan, tidak ada lagi biaya yang lebih dari yang telah ditentukan dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pun sudah tidak ada lagi yang hanya di atas kertas.

Salah satu tugas sosial YLKI adalah menerima pengaduan dan keluhan masyarakat dari berbagai sektor. Tulus menyampaikan bahwa di tahun 2015, pengaduan konsumen

tertinggi ada di sektor perbankan, disusul oleh perumahan, telekomunikasi, belanja online, dan lainnya.

"Sektor listrik biasanya masuk lima besar, tapi tahun kemarin turun menjadi ranking tujuh," ujar Tulus. Artinya, sektor ketenagalistrikan membaik dalam hal pengaduan dan keluhan dari masyarakat. Tulus berharap pengaduan konsumen listrik semakin turun seiring dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan akses penyambungan listrik dan rasio elektrifikasi yang semakin meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, Tulus juga menyoroti SLO yang masih kurang dipahami oleh masyarakat. Ia menyarankan sosialisasi yang lebih masif termasuk mengenai pengetahuan dasar tentang SLO serta mekanisme dan sanksinya.

"Sosialisasi ke masyarakat penting agar mereka tahu. Ini adalah kewajiban menyangkut hak konsumen atas keselamatan ketenagalistrikan," pungkas Tulus. (AMH)

SLO Online Dipamerkan dalam Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik



Tiga inovasi dari Kementerian ESDM berhasil masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. SLO merupakan salah satu inovasi yang dipamerkan dalam Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik 2016.

Setelah masuk Top 99, Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) Online dipamerkan dalam Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik 2016. Bersama dengan *Minerba One Maps Indonesia* (MOMI) dan E-Lelang Migas, SLO Online berpartisipasi dalam pameran yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) ini. Pameran digelar di Jatim Expo Surabaya hari Kamis (31/3) hingga Sabtu (2/4).

Saat mengunjungi Stan Kementerian ESDM, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa SLO Online merupakan suatu standar layanan yang bisa diakses masyarakat untuk menilai kelaikan operasi instalasi tenaga listrik. "Sehingga kita kemudian memiliki kualitas yang lebih baik," terang Sudirman. Dalam kunjungan ke stan yang mengangkat tema Warung Pelayanan KESDM, Sudirman Said didampingi oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Mirawati Sudjono, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, serta Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko.

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menjelaskan bahwa pengawasan SLO yang semula dilakukan secara manual menjadi online sejak 1 Januari 2015 melalui Sistem Database Registrasi SLO Online pada situs slo.djk.esdm.go.id. Sistem Database Registrasi SLO Online terhubung dengan database Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) yang menerbitkan SLO di seluruh wilayah Indonesia. SLO yang diterbitkan oleh LIT-TR dinyatakan sah setelah mendapatkan nomor register dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Jarman juga menyampaikan bahwa melalui website SLO, masyarakat juga dapat mengakses untuk melakukan cek Status Permohonan SLO, verifikasi SLO, serta mencetak salinan SLO.

Melalui Keputusan Menteri PAN RB No. 51/2016, Kementerian PANRB telah menetapkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, dari 2.476 inovasi peserta kompetisi. Dari 11 Inovasi Kementerian, 3 Inovasi berasal dari Kementerian ESDM.

"Kita bersyukur, mudah-mudahan selanjutnya dapat masuk ke-35 besar. Tapi tentu saja ini bukan soal perlombaan, tetapi soal mendorong inovasi di lingkup pemerintahan, termasuk Kementerian ESDM," ujar Sudirman.

Menurut Sudirman, inovasi penting untuk dilakukan setiap saat. Kompetisi menurutnya bagus, namun jangan menjadi tujuan utama. Ketiga inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Kementerian ESDM menurutnya bukanlah sesuatu yang dibuat untuk dilombakan namun dibuat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Registrasi SLO Online sendiri dibuat pada akhir tahun 2014 untuk mempermudah pemberian pelayanan dan pengawasan pada instalasi listrik sesuai dengan kewajiban Pemerintah.

"SLO yang awalnya diterbitkan dalam waktu 7 (tujuh) hari dipercepat menjadi paling lambat 3 (hari)," ujar Jarman. "Bahkan 72% dilakukan kurang dari satu hari," tambahnya. (PSJ)



Sumber gambar: Google.

Mengenal ASEAN POWER GRID

Liputan Khusus

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman mewakili Menteri ESDM pada Senin (9/5) lalu mendampingi Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) Malaysia, YB. Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili meninjau proyek *ASEAN Power Grid* yang ada di Kalimantan Barat.

ASEAN Power Grid (APG) merupakan program yang dimandatkan oleh para Kepala Negara/Pemerintah ASEAN berdasarkan Visi ASEAN 2020. Pada pelaksanaan pertemuan the 17th *ASEAN Ministers on Energy Meeting* di Bangkok pada bulan Juli 1997 yang menghasilkan dokumen *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation* (APAEC) 1999 - 2004 mencakup implementasi program APG. Selanjutnya MoU APG ditandatangani para Menteri Energi pada bulan Maret 2007 dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama negara anggota ASEAN dalam pengembangan kebijakan interkoneksi dan transaksi tenaga listrik lintas batas, dan pada akhirnya untuk merealisasikan APG dalam rangka meningkatkan ketahanan energi regional. Indonesia telah meratifikasi MOU APG tersebut melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengesahan MOU *on the ASEAN Power*

Grid. Secara teknis pembentukan APG memiliki tujuan di antaranya meningkatkan perdagangan listrik lintas batas, lewat integrasi jaringan listrik nasional, untuk memenuhi meningkatnya permintaan listrik dan memperbaiki akses jasa energi dan berbagi kapasitas pembangkit cadangan antar negara anggota ASEAN untuk meningkatkan keamanan secara umum dan mengurangi biaya.

Secara garis besar Interkoneksi ASEAN dibagi menjadi tiga wilayah yaitu *Eastern area*, *Southern area* dan *Northern area*. Sumatera, Singapura, Batam dan Semenanjung Malaysia termasuk di *Southern area*. Kalimantan, Sarawak, Brunei, Sabah, dan Filipina termasuk di *Eastern area* dan Northern area terdiri dari negara-negara yang berada di daratan Asia seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar.

Saat ini sudah ada empat jaringan interkoneksi antar negara ASEAN yang sudah beroperasi. Jaringan tersebut menghubungkan antara semenanjung Malaysia-Thailand, Semenanjung Malaysia-Singapura, Thailand-Kamboja, dan Vietnam-Kamboja. Total pertumbuhan beban negara ASEAN

diprediksi sebesar 255 GW pada tahun 2025, dan diharapkan dengan terbangunnya interkoneksi negara ASEAN melalui APG dapat berkontribusi sebesar 19,5 GW dalam transaksi listrik ke negara yang membutuhkan dan 3 GW dalam hal pertukaran energi akibat perbedaan beban puncak. APG diprediksi bisa menghemat biaya operasi dan investasi sebesar 4,475 juta US dolar.

Proyek interkoneksi antara Indonesia dan Malaysia dalam kerangka APG terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Proyek Sarawak – Kalimantan Barat
2. Proyek Sumatra – Semenanjung Malaysia
3. Proyek Sabah – Kalimantan Utara

Secara bilateral kedua pemimpin dan pejabat tinggi telah bertemu dan mendiskusikan hal-hal yang dapat dilakukan bersama untuk mempercepat implementasi interkoneksi dimaksud, di antaranya melalui pertemuan antara Menteri ESDM RI dengan Menteri KeTTHA Malaysia pada tanggal 26 Juni 2015 di Jakarta yang menghasilkan kesepakatan pembentukan Komite Teknis untuk memfasilitasi proyek lintas batas antara kedua negara.



Rombongan meninjau proyek *ASEAN Power Grid* yang ada di Kalimantan Barat (9/5).

Pertemuan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri KeTTHA Malaysia dengan mengirimkan surat tertanggal 20 Agustus 2015 yang bermaksud melanjutkan pembentukan Komite Teknis sebagaimana yang telah disepakati pada pertemuan tanggal 26 Juni 2015 sekaligus penyampaian usulan *Term of Reference* Tim Teknis. Selanjutnya kembali berlangsung pertemuan bilateral pada tanggal 21 Januari 2016 di Putrajaya yang dihadiri Menteri ESDM menemui Menteri KeTTHA, di mana dalam pertemuan tersebut Sudirman dan Panglima Maximus mengharapkan interkoneksi Riau-Semenanjung Malaya dan Sabah-

Liputan Khusus

Kalimantan Utara dapat terwujud pula, serta kerja sama energi dapat diperluas di masa mendatang, terutama di bidang energi terbarukan.

Pada tanggal 5 April 2016 di Putrajaya, Malaysia, kembali dilaksanakan pertemuan antara delegasi Indonesia dan Malaysia yang dipimpin oleh Jarman dan Datuk Loo Took Gee, Sekjen KeTTHA Malaysia untuk merealisasikan pembentukan komite teknis bersama antara kedua negara untuk percepatan pelaksanaan proyek interkoneksi antar kedua negara di bawah kerangka APG. Dan sebagai bentuk komitmen bersama, pada tanggal 12 Februari 2016 di sela penyelenggaraan BCEF, Sudirman dan Panglima Maximus menandatangani *Joint Statement on the Acceleration of the Implementation of Power Interconnection Projects between Indonesia-Malaysia Under ASEAN Power Grid*.

Status Terkini Proyek ASEAN Power Grid Indonesia-Malaysia

1. Proyek Sarawak – Kalimantan Barat

Proyek ini merupakan interkoneksi *High Voltage Alternate Current (HVAC)* antara Gardu Induk (GI) Mambong 275kV di Mambong, Sarawak, dengan GI Bengkayang 275kV di Kalimantan Barat melalui saluran transmisi sirkuit ganda 275kV dengan frekuensi 50Hz. Interkoneksi tersebut telah *energized* dan sinkron pada tanggal 20 Januari 2016 di mana saat ini dengan pasokan 50MW. Selanjutnya, pasokan energi listrik akan meningkat hingga 170MW seiring penyelesaian saluran transmisi dan GI 500kV di Sarawak, dan menjadi 230MW dalam 6 (enam) bulan berikut.



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (tengah) diwawancarai media terkait ASEAN Power Grid.

2. Proyek Sumatra – Semenanjung Malaysia

Studi Kelayakan tahap I terkait *High Voltage Direct Current (HVDC)* telah usai dan dipandang layak secara ekonomi bisnis dan teknis. *Joint Development Agreement (JDA)* antara PLN dan PTBA dengan TNB sedang tahap kajian mendalam untuk perbaharuan. TNB menyatakan siap menindaklanjuti dan menandatangani dalam waktu yang tidak lama.

Untuk itu mereka akan melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai kelanjutan proyek. Studi Kelayakan yang dilaksanakan oleh PT. Bukit Asam telah usai. Pihak Malaysia mengharapkan percepatan proyek interkoneksi ini dapat COD pada tahun 2021. Proyek ini disingkat dengan nama PERTALIAN (Pertautan-Tambang-Listrik-Interkoneksi-Antar-Bangsa). Proyek melibatkan investasi PLTU Mulut Tambang dan interkoneksi HVDC.

3. Proyek Sabah – Kalimantan Utara

Proyek ini diinisiasi oleh IPP, yaitu MASER dan IM Power dengan titik interkoneksi melalui Tawau atau Kalabakan di Tarakan, Kalimantan Utara. Atas inisiatif baru tersebut masih memerlukan kajian mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.

Kondisi Ketenagalistrikan di Kalimantan Barat

Sistem kelistrikan Kalimantan Barat terdiri dari atas 1 (satu) sistem interkoneksi yaitu sistem Khatulistiwa (termasuk interkoneksi Kalbar – Sarawak) dan 7 (tujuh) sistem *isolated* yaitu sistem Ketapang, Ngabang, Sekadau, Sanggau, Nanga Pinoh, Sintang, Putusibau. Neraca daya total sistem di Kalimantan Barat memiliki daya mampu sebesar 499 MW, beban puncak sebesar 481 MW, dan cadangan sebesar 18 MW. Sistem interkoneksi Kalbar-Sarawak mulai beroperasi dan masuk dalam sistem Khatulistiwa sejak tanggal 20 Januari 2016 pukul 14.26 dengan pasokan daya sebesar 50 MW melalui satu sirkuit dan akan bertambah menjadi 90 MW pada bulan Mei 2016. Penyelesaian satu sirkuit lainnya direncanakan pada bulan Mei 2016.

Liputan Khusus

Pengoperasian Sistem Interkoneksi Kalbar-Serawak

Jangka waktu kerja sama jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat dengan *Sarawak Electricity Supply Corporation* (SESCO) adalah selama 20 tahun yang terdiri dari :

- a. Fase pertama (5 tahun): skema *take and pay*, di mana PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar mengimpor tenaga listrik dari SESCO mulai dari 50 MW dan naik secara bertahap tergantung kesiapan jaringan transmisi di Indonesia dan membayar sesuai dengan jumlah energi listrik yang diimpor.
- b. Fase kedua (15 tahun): skema *take or pay*, di mana dimungkinkan bagi kedua pihak untuk saling bertransaksi jual beli tenaga listrik dengan kapasitas jual beli yang akan dibicarakan kemudian.

Pengaturan pengoperasian sistem interkoneksi Kalbar-Serawak dilakukan oleh komite *Grid System Operator* (GSO) yang diwakili oleh kedua pihak:

- a. Sarawak Grid System Operator: Senior Vice President, Grid Operation Division (Assistant General Manager, Manager, Senior Engineer).
- b. PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat: General Manager, Manajer Transmisi dan Distribusi, Manajer Niaga, Manajer APDP.

Pengaturan pasokan tenaga listrik dari SESCO masih dilakukan secara manual, karena belum dilengkapi teknologi *Automatic Generation Control* (AGC), dan besaran daya diatur oleh PT PLN (Persero) APDP Wilayah Kalbar dengan rentang $\pm 10\%$. Perhitungan transaksi energi dilakukan secara bulanan pada akhir bulan pukul 24.00 Waktu Serawak dengan acuan hasil pengukuran kWhmeter main di GITET Mambong. Kedua belah pihak masing-masing memiliki 3 (tiga) kWh meter yang terdiri dari kWhmeter *main*, *check*, dan pembanding. Hal-hal yang diatur terkait dengan kualitas daya pada sistem interkoneksi Kalbar – Serawak antara pihak PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar dan SESCO adalah tegangan dengan toleransi $275 \pm 5\%$ kV, frekuensi $50 \pm 0,2$ Hz, dan faktor daya minimum sebesar 0,9.

PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat mengimpor listrik dari SESCO melalui jaringan transmisi 275 kV sepanjang 120 km yang menghubungkan gardu induk GITET Bengkayang (Kalbar) dengan GITET Mambong (Serawak). Jumlah menara transmisi milik Indonesia (dari GITET Bengkayang sampai perbatasan) sebanyak 201 menara dan menara transmisi milik Malaysia (dari GITET Mambong sampai perbatasan) sebanyak 144 menara.

Manfaat Sistem Pengoperasian Interkoneksi Kalbar – Sarawak, dan Sistem Kalimantan

Sejak beroperasinya sistem interkoneksi Kalbar-Serawak, terjadi 1 (satu) kali gangguan pada tanggal 6 April 2016 selama 45 menit sebesar 50 MW tetapi tidak menimbulkan *blackout* pada sistem Khatulistiwa karena beroperasinya *underfrequency relay* untuk



Sumber gambar: Google.

mengantisipasi kehilangan daya tersebut. Sistem interkoneksi Kalbar – Serawak menambah pasokan daya pada sistem Khatulistiwa, sehingga tidak terjadi defisit:

a. Sebelum beroperasinya sistem interkoneksi Kalbar – Serawak, neraca daya sistem Khatulistiwa mengalami defisit sebesar 27 MW (daya mampu sebesar 258,4 MW dan beban puncak sebesar 285,4 MW).

b. Setelah beroperasinya sistem interkoneksi Kalbar – Serawak, neraca daya sistem Khatulistiwa memiliki cadangan sebesar 17 MW (daya mampu sebesar 308,4 MW dan beban puncak sebesar 291,4 MW).

Dengan beroperasinya sistem interkoneksi Kalbar – Serawak, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik sebagai berikut:

a. Sebelum beroperasinya sistem interkoneksi Kalbar – Serawak, BPP tenaga listrik sekitar Rp 1.977/kWh,

b. Setelah beroperasinya sistem interkoneksi Kalbar – Serawak, BPP tenaga listrik sekitar Rp 1.642/kWh.

(Asumsi: harga HSD = Rp 9.000/liter, MFO = Rp 7.000/liter, BPP impor = 30,91 Ringgit/kWh = Rp 1.000/kWh) (RBS)

SUBSIDI LISTRIK HARUS TEPAT SASARAN



Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik Jisman menjelaskan subsidi listrik tepat sasaran dapat membantu melistriki wilayah yang rasio elektrifikasinya rendah.

Pemerintah menegaskan subsidi listrik hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Namun selama ini subsidi juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Oleh karena itu, pemerintah menertibkan pelanggan rumah tangga 900 VA yang tidak layak menerima subsidi, sementara pelanggan 450 VA masih tetap diprioritaskan untuk mendapat subsidi listrik. Demikian disampaikan oleh Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik Jisman Hutajulu dalam paparannya dalam acara bertajuk "Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk Mendukung Kedaulatan Energi" di Surabaya (30/3).

Jisman menjelaskan tentang kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Ia mengatakan pemerintah menjaga agar penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien dan menjaga keseimbangan kepentingan penyedia listrik (PLN) dan konsumen. Pemerintah juga melakukan evaluasi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik PLN, dengan berprinsip pada *allowable cost* dan memaksimalkan efisiensi melalui diversifikasi energi primer dan penurunan *losses*. Jisman menambahkan, subsidi listrik diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu, dan tarif konsumen lainnya ditetapkan sesuai keekonomian secara bertahap.

"Tarif tenaga listrik tidak ditetapkan semena-mena oleh pemerintah, tapi juga melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat," ujar Jisman. Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tanggal 17 September 2015 dan hasil Panja Banggar DPR RI tanggal 30 September 2015, disepakati bahwa subsidi listrik tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp38,39 triliun yang difokuskan pada rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ini berkurang dibanding subsidi tahun 2015 yakni Rp66,15 triliun.

Penurunan subsidi listrik ini akan dialihkan untuk melistriki wilayah yang rasio elektrifikasinya masih rendah, seperti di daerah Indonesia bagian timur. Rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2015 adalah 88,30%. Artinya, masih ada 11,7% wilayah di Indonesia yang masih belum teraliri listrik. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di tahun 2019 sebesar 97,35%.

Berdasarkan data TNP2K, ada 4,15 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin pelanggan daya 900 VA yang layak mendapat subsidi. Sementara itu, jumlah pelanggan rumah tangga daya 900 VA adalah 22,8 juta. Dengan demikian, ada 18,65 juta pelanggan rumah tangga yang tidak lagi diberikan subsidi listrik.

Pemerintah menugaskan kepada PLN untuk melakukan pendataan bagi konsumen rumah tangga daya 900 VA sebanyak 4,15 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin yang layak mendapat subsidi. Pencocokan data tersebut dilakukan PLN sejak 18 Januari 2016 dan selesai dilakukan pada 12 Maret 2016. Untuk mengantisipasi error data yang dikeluarkan oleh TNP2K, pemerintah siapkan POSDUMAS (pos pengaduan masyarakat) di tingkat kelurahan atau Badan Permusyawaratan Desa di tingkat desa terkait pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran

"Misal harusnya disubsidi namun tidak, maka bisa lapor. Begitu juga sebaliknya. Nanti kami kembalikan lagi ke TNP2K untuk dicek," pungkas Jisman. (AMH)

Subsidi Listrik Tepat Sasaran Perlu Dukungan Banyak Pihak

*Subsidi listrik hanya akan diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah agar subsidi listrik lebih tepat sasaran.
Sumber gambar: Google.*



Subsidi Listrik hanya akan diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan agar subsidi listrik lebih tepat sasaran. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sosialisasi mengenai hal ini perlu dilakukan secara masif dan dukungan dari berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, saat memimpin Rapat Persiapan Penerapan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2016 di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (7/4). Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widiyanto, perwakilan dari Kementerian Dalam negeri, Kementerian Kominfo, dan PT PLN (Persero). Rapat membahas evaluasi pencocokan data rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan daya 900 VA, serta mekanisme sosialisasi dan penanganannya pengaduan masyarakat.

Menurut Jarman, saat ini penerapan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran memasuki tahap finalisasi, namun pekerjaan besar menanti khususnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut menurutnya membutuhkan dukungan dari semua pihak khususnya Kementerian Kominfo, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri. "Kerjasama perlu dilakukan dengan baik, tentu bersama-sama dengan PLN" sambung Jarman.

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Workshop Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang dilaksanakan di Bandung awal Maret lalu. PT PLN telah menyampaikan proses dan progress pencocokan Basis Data Terpadu (BDT), mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum terdata, serta tahapan sosialisasi dan komunikasi. TNP2K juga telah menyampaikan rekomendasi mekanisme pengaduan yang memanfaatkan peran desa dan kelurahan sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait kepesertaan.

Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM juga telah bergerak dengan mengundang seluruh humas Kementerian/Lembaga dalam Forum Bakohumas di Surabaya dengan mengangkat tema pemberian subsidi listrik tepat sasaran. Diharapkan para Humas Kementerian/Lembaga tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini.

Acara rapat koordinasi ini ditutup dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara TNP2K yang diwakili Sekretaris Eksekutif Bambang Widiyanto dan Kementerian ESDM yang diwakili oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman. MoU ini terkait basis data terpadu yang tengah disiapkan oleh TNP2K. (PSJ)

SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN AGAR LISTRIK DINIKMATI MERATA



Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan bahwa menggeser subsidi listrik pada masyarakat yang benar-benar berhak merupakan bentuk equal treatment atau pemihakan pada mereka yang belum beruntung.

Menaikkan rasio elektrifikasi secara signifikan dalam rentang lima tahun merupakan tanggung jawab berat. Namun dengan menggeser subsidi listrik ke masyarakat yang benar-benar berhak, selain menghemat belasan triliun rupiah, penghematan itu bisa dialihkan ke tempat-tempat yang listriknya masih rendah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertajuk Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerja sama dengan Harian Kompas, Rabu (27/4).

"Kita bukan saja menjaga subsidi jatuh kepada yang berhak, namun itu juga bentuk *equal treatment* atau pemihakan kepada mereka yang belum beruntung," jelas Sudirman.

Warta Kita

Budiman Tanuredjo (kanan) dari Kompas dan Fabby Tumiwa (bawah) dari Institute for Essential Services Reform (IESR) ikut menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerja sama dengan Harian Kompas, Rabu (27/4).



Ia kembali mengingatkan jika listrik adalah pintu masuk kemajuan peradaban. Menurutnya, listrik adalah sebuah drive atau dorongan menuju kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, ujarnya, membangun listrik tidak boleh dilihat sebagai sebuah pekerjaan.

"Ini (membangun listrik) bukan bisnis. *This is movement*, ini satu gerakan," Sudirman menegaskan. Sudirman melanjutkan, sebagai sebuah gerakan, dibutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk *stakeholder*, parlemen, dan media.

"Mari kita angkat (pembangunan) listrik sebagai sebuah gerakan. Secara nasional dukungan media, parlemen, pemerhati, YLKI menjadi sangat penting. Bagaimana media dan para *opinion leader* menggeser *noise menjadi voice*. Yang diharapkan itu sesuatu yang sifatnya solutif, bukan

sekedar *dwelling* atau menggali masalah-masalah masa lalu." Sudirman kemudian menceritakan bahwa dalam perannya sebagai Menteri ESDM, ia telah mengunjungi pelosok-pelosok negeri. Tempat-tempat yang belum terlistriki dengan baik, menurut Sudirman, ada di tempat-tempat yang paling sulit, jauh dari pusat kekuasaan dan jauh dari pusat pembuatan kebijakan.

"Saya menyimpulkan membangun listrik seperti mencapai nilai ujian. Untuk mendapatkan nilai rata-rata 6-7 kita bisa, nilai 8-9 perlu effort yang lebih. Dan dari 8 menuju 10 memerlukan kesempurnaan. Tidak boleh salah, fokus pada hal yang belum dicapai," tutur Sudirman.

Sudirman menjelaskan jika beberapa kabupaten baru sama sekali belum tersentuh listrik. Di enam provinsi Indonesia bagian timur, rasio elektrifikasi 46 kabupaten di sana masih di bawah 50%. Di seluruh Indonesia, lanjut Sudirman, ada 56 kabupaten dan ada 12.659 desa yang belum dilistriki dengan baik, dan 12.519 di antaranya betul-betul masih gelap. Itulah sebabnya subsidi tepat sasaran penting agar penghematan bisa dilakukan supaya listrik merata di Tanah Air.

Diskusi ini menampilkan paparan dari Dirjen Ketenagalistrikan Jarman yang menjelaskan teknis subsidi listrik tepat sasaran. Selain itu, ada pula paparan dari PLN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengamat kelistrikan, hingga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (AMH)

Pemerintah Cari Solusi Masalah Energi di Nusa Tenggara



Kunjungan ke PLTU Jeranjang, Nusa Tenggara Barat (28/4) dilakukan oleh pimpinan KPK, pemerintah pusat dan daerah, serta PT PLN (persero).

Sebagai usaha mengurai berbagai permasalahan sektor energi di Nusa Tenggara, Kementerian ESDM bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/4) menyelenggarakan pertemuan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Kedaulatan Energi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertemuan ini mengundang seluruh elemen pemerintah daerah, badan usaha, elemen masyarakat di NTB dan NTT.

Ketua KPK Agus Raharjo dalam sambutannya mengapresiasi keinginan

dari peserta untuk melakukan perbaikan tata kelola di sektor energi. Menurutnya pertemuan Korsup ini perlu dilakukan secara periodik.

"KPK akan membantu turun ke lapangan membantu permasalahan," jelasnya.

Menurutnya tugas KPK tidak hanya melakukan penindakan namun juga pendampingan, pencegahan, serta monitoring. Fokus dari pendampingan melalui Korsup ini adalah mengurai

persoalan perizinan, permasalahan lahan, pemenuhan hak-hak masyarakat dan deregulasi.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul menyampaikan berbagai persoalan ketenagalistrikan dari pembangkitan hingga jaringan listrik yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun Kementerian/Lembaga lainnya. Kondisi kelistrikan di NTB dan NTT dijelaskan Alihudddin sebagian besar masih dalam

Warta Kita



kondisi siaga. Rasio elektrifikasi di NTB masih berada pada angka 72%, sedangkan NTT sebesar 53%. Angka ini lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 87%.

Untuk itu program 35.000 MW memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya sehingga masyarakat dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Menurut Alihuddin, dukungan tidak hanya pada pembangunan pembangkit, namun juga pada pembangunan jaringan transmisi sehingga listrik yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.



Dalam pembahasan Korsup tersebut, diharapkan adanya upaya sistematis dari semua pihak untuk mengembangkan potensi energi terbarukan sebagai pembangkit listrik. "Kebutuhan energi terus meningkat. Harus kita sediakan " jelas Agus Raharjo.

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi yang hadir dalam Korsup tersebut menegaskan pentingnya membuka kesempatan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai pembangkit listrik. Ia berharap pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit yang akan dibangun di NTB serta mengoptimalkan pembangkit yang telah berjalan.



Keesokan harinya, Kamis (28/4) dilaksanakan kunjungan ke PLTU Jeranjang (4 x 25 MW) di NTB yang dihadiri KPK, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan jajaran PT PLN (Persero) yang khusus mengurai persoalan-persoalan ketenagalistrikan di NTB. Selanjutnya rangkaian acara Korsup akan dilanjutkan untuk daerah Indonesia Timur, Sulawesi, dan Sumatera Bagian Selatan sebelum ditutup di Jakarta. (PSJ)

Atas - Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kiri) turut hadir dalam acara Korsup Kedaulatan Energi di Lombok, NTB.

Tengah - Pemaparan mengenai kondisi kelistrikan di NTB.

Bawah - Kunjungan ke PLTU Jeranjang (4x25 MW) menjadi salah satu acara dalam rangkaian Korsup Kedaulatan Energi.

ENAM PROVINSI

Jadi Pilot Project Program Indonesia Terang

Akses desa terhadap listrik masih minim. Ada 12.659 desa di Indonesia yang belum mendapatkan pasokan listrik, 2.527.469 KK dengan jumlah penduduk sekitar 9.926.515 jiwa. Pemerintah pun mencanangkan Program Indonesia Terang untuk melistriki wilayah Indonesia yang belum terlistriki.

Sasaran Program Indonesia Terang dimulai untuk desa tempat PLN belum hadir, yakni desa-desa yang tidak memiliki listrik sama sekali atau hanya menggunakan sistem pembakaran bahan bakar fosil seperti genset. Demikian disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat memberikan pengarahan pada Forum Tematik Bakohumas di Surabaya (31/3).

Sudirman kemudian menjelaskan ada 10.300 desa target 2019 dalam Program Indonesia Terang. Dari jumlah tersebut, 6.689 desa ada pada enam provinsi yakni Papua (4.047 desa), Papua Barat (1.124 desa), Maluku (434 desa), Maluku Utara (411 desa), Nusa Tenggara Timur (646 desa) dan Nusa Tenggara Barat (27 desa). Total kapasitas yang perlu terpasang adalah 180 MW.

"Sebagian *pilot project* Indonesia Terang akan dilakukan di wilayah Indonesia timur. Enam provinsi tersebut karena karakter geografisnya sama, kita akan



Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan tentang pilot project Program Indonesia Terang

dekati dengan pendekatan yang sama. Mudah-mudahan dalam 4-5 tahun ke depan bisa terang," jelas Sudirman.

Sudirman menyampaikan bahwa listrik adalah jendela peradaban. Dengan adanya listrik, bukan saja terang yang didapat namun pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi juga akan bergerak.

"Rentetan dari masuknya listrik luar biasa besar. Listrik bukan hanya sekedar proyek, tapi juga movement supaya akses kita sama terhadap berbagai hal yang telah disebutkan tadi," Sudirman menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Sudirman juga berbicara mengenai kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

"Pembahasan mengenai EBT tidak boleh lagi menjadi lampiran dari sebuah buku, dengan proyek kecil-kecil tersebar dan pembahasan yang tidak didengar publik. Sekarang kita taruh EBT di depan," tegas Sudirman. Ia mencontohkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 5000 MW yang merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mendorong pemanfaatan EBT. (AMH)

Program 35.000 MW dan Indonesia Terang *Butuh Dukungan Pemda*

Dirjen Ketenagalistrikan berharap pemerintah daerah di Sumatera Bagian Selatan membantu menyelesaikan beberapa persoalan yang menghambat pembangunan ketenagalistrikan di wilayah masing-masing. Menurutnya pembangunan ketenagalistrikan melalui program 35.000 MW dan Program Indonesia Terang tidak akan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah daerah. Hal itu ia sampaikan saat menyampaikan paparan pada acara Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Kementerian ESDM dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Arista Palembang Sumatera Selatan, Rabu (11/5).

Korsup yang kelima ini menghadirkan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Dalam korsup energi ini, KPK ingin membantu menyelesaikan beberapa proyek energi yang terhambat dan mencegah praktek-praktek korupsi di sektor energi. Hadir dalam Korsup tersebut, Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ranu Wiharja dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Satry Nugraha, serta pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah tersebut.

Ranu Wiharja mengajak para pejabat pengguna anggaran untuk patuh dan taat pada sumpah jabatan yang telah diucapkan di depan para bupati dan walikota se Sumbagsel. "Kalau saja elemen di Eksekutif menjalankan apa yang menjadi sumpahnya saat akan menjabat, maka korupsi dapat dihilangkan. Oleh itu marilah bersama



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengharapkan partisipasi Pemda dalam mensukseskan program 35.000 MW saat presentasi dalam forum Koordinasi dan Supervisi bersama KPK di Palembang, Rabu (11/5).

sama untuk masyarakat menjalankan tugasnya dengan jujur," himbau Ranu.

Menurut Jarman, konsumsi perkapita Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tertangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi Bangka Belitung sudah baik namun untuk Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung masih di bawah rasio elektrifikasi nasional.

Ia menegaskan bahwa Program listrik perdesaan dan instalasi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu tetap akan dijalankan. Selain itu untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional, program 35.000 MW dan program Indonesia Terang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Untuk itu dukungan pemerintah daerah sangatlah diharapkan (PSJ)

TIGA CARA MELISTRIKI DAERAH TIMUR INDONESIA

Listrik merupakan pembuka jalan ke peradaban. Listrik memberikan cahaya, dan memberikan akses kepada pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi, sampai pertahanan. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian ESDM memiliki Program Indonesia Terang (PIT). Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jerman, PIT menjadi bagian dari target pemerintah menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan pendekatan khusus, yaitu daerah-daerah terluar dan terisolasi.

"Program Indonesia Terang adalah bagian dari terobosan kebijakan dan peningkatan kapasitas, program ini harus segera diselesaikan untuk memenuhi target rasio elektrifikasi Indonesia", tegas Jerman saat diskusi di Kantor Staf Kepresidenan, Kamis (12/5)

Jerman dalam kesempatan itu menjelaskan tiga cara melistriki kawasan Indonesia timur yang direncanakan oleh pemerintah melalui PIT. Pertama, desa yang berdekatan dengan desa yang telah berlistrik akan dialiri melalui sambungan listrik oleh PT PLN. Melalui program listrik perdesaan dan listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu, pemerintah dan PLN mengejar target rasio elektrifikasi 97% di tahun 2019. Kedua, untuk Desa yang Kepala Keluarga (KK) berdekatan, akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat, sedangkan bagi desa yang Kknnya berjauhan akan dibangun *Solar Home System* (SHS). Menurutnya Sasaran PIT dimulai untuk desa tempat PLN belum hadir, yakni desa-desa yang baik tidak memiliki listrik sama sekali atau hanya menggunakan sistem pembakaran bahan bakar fosil (misalnya genset).

Rapat di Kantor Staf Kepresidenan (12/5) membahas Program Indonesia Terang.



Warta Kita



Dirut PLN Sofyan Basir (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (tengah), Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kanan) dalam diskusi membahas infrastruktur ketenagalistrikan di timur Indonesia.

Menurut Jarman, strategi yang dilakukan untuk PIT adalah inklusif, terjangkau, bertahap, serta transparan dan akuntabel. Inklusif berarti semua pihak terkait akan dilibatkan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan. Terjangkau berarti harga langganan listrik EBT tidak melampaui kemampuan daya beli masyarakat. Bertahap artinya dimulai dari desa-desa tertinggal di pelosok Indonesia Timur dan secara bertahap menuju ke Barat Indonesia. Sedangkan transparan dan akuntabel berarti program ini diaudit dan dievaluasi dampak program tersebut oleh pihak ketiga yang terpercaya.

Menurut Pembina Gabungan Pengusaha Industri Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Fransiscus Welirang, ketersediaan listrik adalah komponen penting dalam perkembangan usaha makanan dan minuman di Indonesia. Apalagi, menurutnya industri makanan dan minuman menyumbang 31 persen dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Listrik menjadi penting karena lebih dari 90 persen industri makanan dan minuman didominasi dengan industri dalam skala kecil dan menengah. Menurutnya peningkatan ketersediaan pembangkit listrik berbagai daerah dilihat dapat memicu kemunculan dan perkembangan industri lokal serta menjadikan Indonesia sebagai sasaran investasi yang baik. (PSJ)



Dirut PLN Sofyan Basir (kanan) menyampaikan paparannya.

KPK KAWAL KETAHANAN ENERGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad mengawal proses pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral. Untuk itu KPK ingin melihat langsung proses bisnis dan memotong mata rantai korupsi. Hal tersebut disampaikan Wakil ketua KPK Laode M Syarif saat menyampaikan sambutan dalam Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Ketahanan Energi yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, Kamis (17/3). "Korsup ini semata-mata ingin mewujudkan kemakmuran rakyat," tegas Laode.

Korsup Ketahanan Energi yang diselenggarakan di Pekanbaru adalah acara pertama dari rencana enam kali pertemuan Korsup Energi bersama KPK. Acara pertama ini mengundang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Plt. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, serta wakil Gubernur kepulauan Riau Soerya Respationo. Dari Kementerian ESDM hadir mewakili Menteri ESDM, Sekretaris Jenderal KESDM M. Teguh Pamudji, Inspektur Jenderal Mochtar Husein, Dirjen Migas IGN Wiraatmaja, dan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Menurut Teguh Pamuji, acara ini merupakan tindak lanjut dari *Kick off-Meeting* Kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Sektor Energi Tahun 2016 yang telah dilaksanakan tanggal 15 Februari 2016 di Gedung KPK, Jakarta. Melalui Korsup Ketahanan Energi, Kementerian ESDM ingin membangun sistem data & informasi terintegrasi (*baseline*) sebagai dasar pengambilan kebijakan sektor energi. "Selain itu kerja sama ini ingin menutup titik rawan korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara di sektor energi," jelas Teguh.

Menurut Teguh hal-hal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam Korsup Ketahanan Energi ini antara lain melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban pelaku usaha, menyelesaikan permasalahan lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang menghambat kegiatan di sektor energi, memperbaiki sistem tata kelola untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi, serta menyelamatkan kekayaan negara. Selain itu menurut Teguh KPK juga akan mengawal pelaksanaan kebijakan energi yang

tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Fokus pelaksanaan kegiatan ini disebutnya mencakup beberapa hal antara lain penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban, pengembangan integritasi sistem data dan informasi, pemenuhan hak-hak masyarakat, pengawasan dan pengendalian, regulasi & kebijakan, serta peningkatan kelembagaan.

Dalam pembahasan yang berlangsung setengah hari tersebut, peserta Korsup khususnya dari pemerintah daerah dapat menyampaikan kendala-kendala yang terjadi selama ini khususnya di subsektor migas. Beberapa kepala daerah juga menyampaikan hambatan yang dialami di daerah masing-masing yang menyangkut sub sektor ketenagalistrikan. Setelah Pekanbaru, rencananya Korsup akan diselenggarakan di Sorong, Surabaya, Lombok, Balikpapan, Palembang, dan DKI Jakarta. (PSJ)

KPK Siap Beri Pendampingan pada Proyek-Proyek Ketenagalistrikan



Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kunjungan lapangan ke PLTU Jeranjang (28/4). Ia menyatakan KPK siap berikan pendampingan pada proyek-proyek ketenagalistrikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memberikan pendampingan pada proyek-proyek ketenagalistrikan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tugas KPK tidak hanya memberikan penindakan pada tindak pidana korupsi saja namun juga pencegahan dan pendampingan melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup), salah satunya Korsup Ketahanan Energi. Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo saat mengikuti kunjungan Lapangan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang (3 x 25 MW) di Lombok, NTB, Kamis (28/4). Dalam kunjungan lapangan tersebut, Agus didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, serta Plh. Direktur Bisnis Regional Sulawesi Nusatenggara PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo.

Sistem kelistrikan di NTB terdiri dari sistem kelistrikan Lombok, Bima, dan Sumbawa dengan kondisi kelistrikan pada umumnya berstatus siaga. Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengungkapkan bahwa kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membutuhkan teknis melistriki yang berbeda dengan negara kontinen. Saat ini kondisi NTB sudah jauh lebih baik, namun menurutnya terdapat beberapa

proyek yang masih membutuhkan dukungan dari KPK dan Komisi VII DPR RI untuk penyelesaiannya.

Agus Rahardjo menyampaikan bahwa melalui Korsup ini, KPK berkomitmen membantu mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi sektor energi termasuk di dalamnya sub sektor kelistrikan. "Jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat, kami punya kewenangan untuk menyampaikannya kepada Presiden," jelas Agus.

Menurut Jarman saat ini persoalan pengadaan lahan untuk infrastruktur ketenagalistrikan telah mendapat payung hukum dengan terbitnya Peraturan Presiden no 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Perpres ini disebutnya telah mempermudah perizinan termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Semua prosedur memang harus dilalui, namun dengan terbitnya Perpres ini, semua dapat dipercepat," jelas Jarman.

Kurtubi menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya mendapat banyak keluhan dari masyarakat NTB terkait seringnya pemadaman listrik. "Apalagi sekarang teknologi sangat maju, masyarakat bisa mengadu lewat hape," jelasnya. Kunjungan ini diharapkan dapat menyemangati PLN untuk bekerja dengan lebih baik dan sesuai dengan peraturan. Jarman juga menjelaskan bahwa saat ini PLN harus patuh pada standard Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Jika terjadi pemadaman, maka PLN wajib memberikan kompensasi sesuai dengan Deklarasi TMP.

PLTU Jeranjang sendiri terdiri dari tiga unit yang masing-masing berkapasitas 25 MW. Unit 3 yang didanai APBN telah beroperasi pada tahun 2012. Sedangkan unit 1 dan 2 ditargetkan selesai tahun ini. Sebelum berkunjung ke PLTU Jeranjang, rombongan menyempatkan diri menengok lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker (60MW) yang akan digunakan saat beban puncak atau malam hari. PLTGU tersebut ditargetkan beroperasi tahun depan. (PSJ)

NARASI TUNGGAL

Penting dalam Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah saat ini tengah gencar memberikan sosialisasi mengenai kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Sebagai upaya untuk pembentukan narasi tunggal dari program kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kebijakan tersebut, Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas bertajuk "Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk Mendukung Kedaulatan Energi" di Surabaya (30/3).

Mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Forum Tematik Bakohumas. Munir mengungkapkan jika harga pokok pembangkitan tenaga listrik belum sepenuhnya mencapai level keekonomian yang dapat dibayar oleh masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan usaha penyediaan tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik bagi kelompok tidak mampu, Pemerintah menyediakan subsidi listrik.

"Selama ini subsidi listrik dinikmati masyarakat mampu. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran," ujar Munir. Dengan demikian, subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya.

Munir juga menjelaskan bahwa Pemerintah mendorong energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai sumber energi primer dalam penyediaan listrik. Ia mengingatkan jika penyediaan listrik bagi masyarakat – selain mempertimbangkan aspek keekonomian – juga harus memperhatikan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.



Sumber gambar: Google.

"Salah satu bentuk nyata inisiatif tersebut adalah dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber energi pembangkit listrik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam tiga tahun ke depan, Kota Surabaya direncanakan menjadi salah satu kota hijau (*green city*) di Indonesia," Munir menjelaskan. Untuk mengembangkan energi baru, Pemerintah bermitra dengan pemda, pengusaha, dan lembaga internasional.

Munir mengajak para peserta forum yang merupakan humas pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memahami kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Ia berharap acara ini juga dapat memberikan pemahaman mengenai program pengembangan EBT Kementerian ESDM. Koordinasi antar-kementerian dan lembaga mesti terus diperkuat. Munir berharap humas pemerintah mendapatkan bekal pengetahuan yang mendalam sehingga dapat menyebarkan informasi sektor ESDM kepada publik. Dengan demikian, publik mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai kebijakan pemerintah.

Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Djoko Agung Harijadi, dalam paparannya juga menekankan pentingnya menciptakan narasi tunggal untuk dapat disebarluaskan ke masyarakat. Djoko kemudian mengutip arahan Presiden Joko Widodo untuk penguatan komunikasi ke rakyat dan country branding Indonesia ke dunia internasional.

Forum Tematik Bakohumas diselenggarakan selama dua hari pada 30-31 Maret 2016. Pada hari pertama diselenggarakan diskusi panel dengan tiga narasumber dari PT PLN (persero), Ditjen Ketenagalistrikan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot Surabaya. Sementara di hari kedua ada pengarahan dari Menteri ESDM Sudirman Said yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo. (AMH)

Galeri

Dirjen Ketenagalistrikan

Ambil Sumpah Jabatan 28 PNS



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengambil sumpah jabatan 28 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (30/5), di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta. Mereka yang diambil sumpahnya merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan tahun 2015. Para rohaniawan ikut mendampingi pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan ini. Selain mengambil sumpah jabatan PNS, Jarman juga memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) 30 Tahun kepada 7 pegawai dan SLKS 10 Tahun kepada 22 pegawai Ditjen Ketenagalistrikan.



Empat orang perwakilan dari tiap-tiap unit eselon II Ditjen Ketenagalistrikan menandatangani berita acara pengangkatan PNS, yakni Suzana A. Wakum, Arif Bagus Prastomo, Elisabet Y. Lenakoly, dan Rahmad Cahyo Nugroho. SK PNS diberikan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dan disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul, dan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Achmad. (AMH)

Galeri



PLTB TERBESAR DI INDONESIA *SIAP DIBANGUN*



Penandatanganan LoC pembiayaan PLTB Sidrap disaksikan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jerman, Kamis (7/4). PLTB ini akan menjadi PLTB terbesar di Indonesia dengan kapasitas 70 MW.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jerman pada Kamis (7/4) menyaksikan penandatanganan *Letter of Cooperation* pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap di kantor pusat PT PLN (Persero), Jakarta. Penandatanganan ini menandai siap dibangunnya pembangkit listrik ramah lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan. Rencananya lokasi tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga bayu terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 70 MW. Hadir menyaksikan penandatanganan ini Direktur Utama PT. PLN (Persero) Sofyan Basir dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake.

Dalam sambutannya Jarman menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah besar dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. "Kita baru saja menyaksikan penandatanganan dari pembiayaan proyek energi terbarukan skala besar. Ini menjadi penanda bahwa energi terbarukan memegang peranan penting dalam sektor energi di Indonesia," ujar Jarman.

Proyek pembangkit listrik di Sidrap ini, menurut Jarman dapat mendukung pencapaian target 25% energi baru terbarukan dalam bauran energi Indonesia di tahun 2025 dan membantu pengurangan emisi sebesar 29% di 2030.

"Kami berharap di tahun 2025 kita dapat mencapai apa yang telah menjadi komitmen kita bersama dan semoga dalam dua tahun ke depan, energi hijau ini akan dapat dioperasikan," jelas Jarman.

PLTB Sidrap dikembangkan oleh *Independent Power Producer* (IPP) Internasional UPC Renewables Indonesia bekerja sama dengan PT Binatek Energi Terbarukan. Provinsi Sulawesi Selatan memang memiliki potensi tenaga angin/bayu yang cukup besar khususnya di Sidenreng Rappang (Sidrap) dan di Jeneponto. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang tersambung ke *grid* Sulsel. Dengan ditandatanganinya *Letter of Cooperation* ini, maka pembangunan proyek ini akan dimulai pada April 2016 dan beroperasi pada 2017.

PLTB merupakan pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan dimana sumber energinya tidak pernah habis. Selain itu energi yang dibangkitkan tidak mencemari lingkungan, memiliki potensi yang sangat besar untuk dibuat dalam skala besar, serta dapat dikembangkan pada daerah remote. Turbin angin menggunakan *space* yang lebih kecil dibanding pembangkit pada umumnya, sehingga tanah disekitar turbin masih dapat digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya untuk pertanian. (PSJ)

Pemerintah Minta PLN Tingkatkan Efisiensi



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan pentingnya efisiensi PT PLN (Persero) dalam Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan di Padang, Kamis (16/5).

Pemerintah meminta PT PLN (Persero) serius meningkatkan efisiensi, khususnya untuk menurunkan susut jaringan. Jika mampu mengurangi biaya produksi, menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, otomatis margin perusahaan akan meningkat. Efisiensi ini menurut Jarman bukan semata-mata menuruti aturan pemerintah namun untuk meningkatkan keuntungan bagi PLN sendiri. Jarman menjelaskan hal tersebut saat membuka Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Listrik, yang digelar di Padang hari Kamis (16/5).

Dalam sambutannya Jarman berharap PLN dapat meniru efisiensi yang dilakukan *Metropolitan Electricity Authority* (MEA), perusahaan listrik di Thailand. Menurutnya ada tiga hal yang dilakukan MEA sehingga dapat menurunkan susut jaringan, yaitu memastikan kualitas tegangan yang bagus, meteran listrik yang dapat dideteksi, serta menindak pencurian listrik. Jarman berharap PLN dapat menerapkan ketiga hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Indonesia. Dengan memperbaiki ketiga hal tersebut menurutnya kualitas pelayanan kepada masyarakat akan naik.

Menurut Jarman Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PT PLN (Persero) harus dijadikan Key Performance Indikator (KPI) di masing-masing area. Jika memperbaiki losses, otomatis pelayanan pelanggan naik," jelas Jarman. Sesuai Permen ESDM nomor 10 tahun 2015, mulai 1 Januari 2016 perhitungan TMP dilakukan oleh pemerintah. Ditjen Ketenagalistrikan akan memonitor deklarasi TMP yang telah disampaikan oleh masing-masing Wilayah PLN.



Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero), Djoko Rahardjo Abumanan menyatakan bahwa PT PLN menyiapkan orang-orang muda untuk mengikuti workshop ini.



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan pentingnya efisiensi PT PLN (Persero) dalam Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan di Padang, Kamis (16/5).

Jarman berpesan agar PLN terus meningkatkan efisiensi sehingga target rasio elektrifikasi, susut jaringan dan *getting electricity* terus membaik. "Kita jangan kalah dari negara-negara tetangga," tegas Jarman. Untuk itulah ia meminta layanan sambungan satu pintu PLN yang sudah berjalan di Jakarta dan Surabaya, pada akhir tahun ini dapat diimplementasikan di seluruh area kecuali area *remote*.

Menurut Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero), Djoko Rahardjo Abumanan, PT PLN menyiapkan orang-orang muda untuk mengikuti workshop yang diselenggarakan Ditjen Ketenagalistrikan tersebut. Ia mengaku bahwa PLN ditargetkan untuk terus melakukan penyambungan listrik. Namun menurutnya jika terus melakukan penyambungan tanpa melakukan perbaikan sistem, maka susut jaringan akan meningkat.

"Susut membuang keuntungan PLN," jelas Djoko. "Mari kita duduk, membuat workplan dan mematuhi workplan itu," tambahnya. Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik ini merupakan acara yang diselenggarakan Ditjen Ketenagalistrikan dengan mengundang PT PLN (Persero) di seluruh wilayah dan area. Peserta untuk workshop di padang ini mencapai seratus orang. (PSJ)

Program 35.000 MW

Perwujudan Nawa Cita



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa program 35.000 MW merupakan perwujudan empat dari sembilan nawa cita.

Program 35.000 yang diresmikan oleh Presiden Jokowi merupakan perwujudan dari nawacita. Setidaknya empat dari sembilan butir nawacita tercapai dengan program pembangunan ketenagalistrikan ini. Melalui program 35.000 MW, pemerintah ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, saat membacakan *keynote speech* Menteri ESDM dalam acara Rembug Nasional Kebutuhan Energi Listrik untuk Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan, Rabu (30/3). Acara ini diselenggarakan oleh Institut Lembang Sembilan di Hotel Aston Makassar, Sulawesi Selatan. Melalui acara ini, Institut Lembang Sembilan mengajak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program 35.000 MW agar dapat berjalan sesuai dengan target.

Dalam rembug nasional tersebut Jarman optimistis program 35.000 MW dapat berjalan meski menghadapi berbagai rintangan. "Dengan selesainya program 35.000 MW kita harapkan konsumsi perkapita kita akan meningkat, kekurangan listrik dapat diatasi, mampu mengejar ketertinggalan rasio elektrifikasi dari negara-negara tetangga, serta tidak kalah penting target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai," jelas Jarman.

Dengan 5000 MW yang akan dibangun oleh PT PLN, Jarman berharap PLN dapat lebih fokus untuk menyelesaikan pembangunan sistem transmisi tenaga listrik sehingga daya yang dibangkitkan dapat dievakuasi dengan baik. Dengan selesainya program 35.000 MW, maka total kapasitas pembangkit listrik nasional akan mencapai 100 GW. "PLN akan mengelola kapasitas sekitar dua kali lipat dari kapasitas sekarang, oleh karena itu dibutuhkan orang yang tepat dalam mengambil keputusan," jelas Jarman.

Kementerian ESDM menyambut baik diskusi publik yang mengangkat tema pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Program 35.000 membutuhkan koordinasi dan dukungan semua pihak baik dari instansi Kementerian/ Lembaga, PLN, Pemda, stakeholder dan masyarakat. Jarman juga mengingatkan para pengembang listrik swasta untuk lebih serius dan berkomitmen, sebab 35.000 MW bukanlah sebuah mimpi kosong tetapi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.

Dalam rembug nasional tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono memaparkan materi mengenai upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional. Selain menjelaskan kondisi kelistrikan nasional dan perencanaan ketenagalistrikan yang tertuang dalam draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Agoes juga memaparkan kendala dan solusi dari program 35.000 MW. (PSJ)



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono (kedua dari kanan) memaparkan materi mengenai upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional.



Kementerian ESDM menyambut baik diskusi publik yang mengangkat tema pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.

Teten Masduki: 35.000 MW Satu-satunya di Dunia

Program percepatan pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW yang diluncurkan Presiden Jokowi April 2015 lalu menurut Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki merupakan satu-satunya di dunia. Teten mengaku bahwa pelaksanaan program ini bukan sesuatu hal mudah, namun proyek ini sangat penting dibangun untuk membangkitkan ekonomi nasional.

"Memang ini satu-satunya di dunia. Proyek 35 ribu MW tidak ada di dunia cuma ada di Indonesia," jelasnya saat diskusi bersama Dirjen Ketenagalistrikan Jerman dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (12/5).

Menurut Teten, pemerintah saat ini gencar melakukan pembangunan infrastruktur kelistrikan, pelabuhan, dan bandara khususnya bagi Indonesia bagian timur yang masih tertinggal. Presiden ingin membawa Indonesia menjadi negara tujuan investasi. "Kita butuh itu karena dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak cukup untuk serap tenaga kerja," jelasnya. Teten juga menilai lesunya ekonomi dunia merupakan saat yang tepat bagi Indonesia untuk berbenah. Agar ketika ekonomi dunia membaik, Indonesia siap untuk berkompetisi. "Ini momen yang ingin dicapai presiden," ungkapnya.

Sofyan Basir dalam diskusi tersebut menjelaskan bahwa PT PLN (Persero) terus berupaya mewujudkan 35.000 MW termasuk di dalamnya memperbaiki struktur dan SDM yang ada di organisasi internal PLN. Hingga April 2016 disebutkan sudah ada pembangkit dengan kapasitas 3.400 MW yang beroperasi atau sekitar 1 persen dari total kapasitas.

Beberapa terobosan yang dilakukan PLN antara lain percepatan proses tender semula 8 bulan menjadi 4,5 bulan. "Financial Close semula 1 tahun menjadi 6 bulan," terangnya. Kemudian Konstruksi PLTU semula 54 bulan setelah Financial Close ditargetkan menjadi 48 bulan setelah tandatangan PPA (Power Purchase Agreement) dan Konstruksi PLTG/



Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (kiri) menjelaskan saat ini pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

PLTD/PLTMG semula 12-24 bulan ditargetkan menjadi 6-18 bulan. Tak hanya itu, pembangunan Tranmisi, semula rata-rata 1.500 kms per tahun ditargetkan menjadi 9.000 kms per tahun. Pembangunan gardu Induk, semula rata-rata 2.000 MVA per tahun ditargetkan menjadi 7.000 MVA per tahun.

Perihal melistriki Indonesia Timur, PLN mengaku yang menjadi Key Performance Indicator (KPI) bukanlah margin keuntungan namun peningkatan rasio elektrifikasi. Ia ingin listrik berada di depan peningkatan ekonomi. "Listrik yang menciptakan ekonomi. Kami tidak mau mengekor," tegasnya. (PSJ)

Pemerintah Bertekad Kurangi BBM dalam Pembangkit Listrik

Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai energi primer pembangkit listrik selain kurang ramah lingkungan juga mahal biaya produksinya. Jika menggunakan BBM, harga jual listrik mencapai sekitar Rp 2.200 per kw, sedangkan jika menggunakan gas hanya sekitar Rp 1.300 per kw. Pengalihan bahan bakar pembangkit listrik dari BBM ke gas telah menghasilkan saving bagi PT. PLN (Persero) di tahun 2015 sebesar Rp 15 triliun. Untuk itu Pemerintah bertekad mengurangi BBM dalam bauran energi primer pembangkit listrik. Keputusan tersebut sesuai dengan amanat Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUKN).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman saat mendampingi kunjungan Menteri ESDM saat meninjau kesiapan *Compressed Natural Gas (CNG) Plant* Gresik yang berada di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan uap (PLTGU) Gresik, Jawa Timur. Menurutnya dengan mengalihkan bahan bakar pembangkit dari BBM ke gas akan memberi banyak keuntungan, selain lebih hemat dari sisi biaya, penggunaan bahan bakar gas juga lebih bersih dan ramah bagi lingkungan.

"Pemerintah dan PLN sudah komit untuk mengurangi pembangkit-pembangkit yang menggunakan BBM, tahun 2011 prosentase pembangkit yang menggunakan BBM itu 22% dan tahun 2014 pembangkit yang menggunakan BBM menyusut menjadi hanya 12%," jelas Jarman. Konversi dari pembangkit listrik tenaga diesel ke gas akan terus dilakukan. "Tahun 2016 ini, diharapkan kita akan turunkan lagi menjadi sekitar dibawah 7% artinya konsumsi BBMnya dibawah 6 juta kiloliter untuk seluruh Indonesia," lanjut Jarman.

Pembangunan CNG Plant di Gresik merupakan salah satu upaya PLN untuk mendukung Pemerintah dalam mempercepat proyek ketenagalistrikan 35.000 MW sebab CNG Plant Gresik yang direncanakan mulai beroperasi pada April 2016 ini memasok kebutuhan listrik di pulau Jawa. Dengan beroperasinya CNG Plant pada PLTGU Gresik, pada saat beban puncak pembangkit dapat beroperasi menggunakan gas, sehingga tidak lagi menggunakan Bahan

Bakar Minyak (BBM). "Pemerintah serius untuk menggeser energi fosil yang polutif ke energi terbarukan yang bersih. Apa yang telah dilakukan PJB Gresik akan menjadi role model bagi pembangkit lain", papar Menteri ESDM Sudirman Said.

Saat ini CNG Plant Gresik masih dalam tahap Commissioning. Saat beban puncak, pembangkit ini dapat menggantikan pembangkit BBM sebesar 300 MW, sehingga dapat mengurangi pemakaian BBM setara 450 kilo liter per hari atau menghemat sekitar Rp 2, 25 Miliar per hari. CNG Plant Gresik juga dimanfaatkan untuk memasok gas ke Pulau Bawean, pulau kecil di utara Gresik. Ke depan, CNG Plant ini akan dikembangkan untuk memenuhi energi primer pembangkit listrik ke pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau fasilitas pipa gas. (PSJ)

DELEGASI MALAYSIA Kunjungi Calon Tapak GI Perawang

Dalam rangkaian Pertemuan *the 1st Joint Technical Committee (JTC)* on Bilateral Interconnection Projects antara Indonesia – Malaysia, delegasi Malaysia yang terdiri dari perwakilan Suruhan Jaya (*Energy Commission*), Kementerian TTHA Malaysia, TNB, SEB dan SESB didampingi perwakilan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PT. PLN (Persero), PT. Bukit Asam (PTBA), Dinas ESDM Provinsi Riau dan perwakilan pejabat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau meninjau calon lokasi tapak pembangunan Gardu Induk (GI) Perawang, Selasa (17/05).

Lokasi tapak GI Perawang saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan, di mana sebagian besar lahan dimaksud masih berupa kebun kelapa sawit. Kota Perawang sendiri terletak sekitar 60 Km dari pusat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau arah timur laut, dan dapat ditempuh dengan perjalanan darat sekitar dua jam melalui jalan Minas – Perawang yang sebagian besar sudah merupakan jalan beton permanen. Jalan tersebut dibeton untuk mengakomodasi transportasi hasil perkebunan kelapa sawit yang menggunakan truk bertonase besar.

GI Perawang direncanakan sebagai GI Konverter AC-DC termasuk bagian dari proyek interkoneksi antara Sumatera – Peninsular Malaysia dalam kerangka kerja sama ASEAN Power Grid (APG) saluran transmisi interkoneksi HVDC (High Voltage Direct Current) 600MW. Total panjang transmisi sekitar 259 Km dari Perawang (Riau, Indonesia) ke Telok Gong (Peninsular Malaysia), di mana termasuk 59 Km kabel bawah laut dan 200 KM Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Saluran transmisi akan melalui Selat Rupat, Pulau Rupat dan Selat Malaka.

Dalam peninjauan tersebut, delegasi Malaysia menyampaikan harapan agar hal-hal terkait pembebasan lahan dapat segera tuntas agar proyek interkoneksi dapat segera terwujud. Kedua negara membutuhkan proyek tersebut karena transaksi listrik dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan beban puncak kedua negara. (RBS)

Dirjen Jarman mendampingi Delegasi Malaysia mengunjungi calon lokasi tapak pembangunan Gardu Induk Perawang (17/5)



Hindari Bahaya, Instalasi Listrik Harus Sesuai PUIL 2011

Energi listrik selain bermanfaat juga dapat menimbulkan bahaya jika pemasangannya tidak sesuai standard. Namun masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya yang ditimbulkan jika instalasi listriknya sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik (PUIL). Hal tersebut disampaikan oleh Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan Agus Sufianto saat membacakan sambutan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada pembukaan Forum PUIL yang diselenggarakan di Hotel Grand Tulip, Banjarmasin, Rabu (25/5).

"Belakangan ini, kita sering mendengar berita kebakaran di perumahan dan beberapa area publik seperti pasar/pusat perbelanjaan, yang sebagian besar penyebabnya diduga adalah bahaya akibat listrik," ungkap Agus. "Untuk menghindari bahaya akibat listrik, maka instalasi tenaga

listrik harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, di Indonesia dikenal sebagai Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL," tambahnya. Saat ini yang menjadi standar wajib adalah PUIL 2011 beserta amandemennya sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014. PUIL 2011 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi saat akan memasang instalasi listrik voltase rendah (230 V), baik untuk perumahan, komersial maupun industri.

Menurut Agus, terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki oleh instalasi tenaga listrik untuk mendukung aspek keselamatan. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh instalasi listrik tersebut antara lain penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, penerapan sertifikat laik operasi (SLO)



Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan Agus Sufianto menegaskan pentingnya instalasi tenaga listrik berstandard.

Warta Kita

bagi instalasi tenaga listrik yang beroperasi, penerapan sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan, penerapan akreditasi, klasifikasi dan sertifikasi bagi usaha penunjang tenaga listrik, penerapan ketentuan lingkungan hidup bagi usaha penyediaan tenaga listrik. Jika kelima aspek tersebut terpenuhi maka keselamatan ketenagalistrikan akan terjamin.

Agus menambahkan Bimbingan Teknis Melalui Forum PUIL 2011 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan wadah bagi pelaku usaha, industri, pakar, dan konsumen dalam menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya untuk penyempurnaan PUIL yang disepakati oleh semua pihak secara konsensus.

"Tugas di bidang standardisasi tidak pernah selesai, penyusunan PUIL perlu mempertimbangkan aspek persyaratan teknis dan kemampuan industri nasional serta daya beli masyarakat," sebutnya. Ia menambahkan bahwa komunikasi dan kerjasama yang telah terbina dengan baik dalam masyarakat standardisasi ketenagalistrikan perlu terus ditingkatkan.

Peserta yang menghadiri acara Forum PUIL ini berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yg diwakili oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, civitas akademika, asosiasi, serta perwakilan dari perusahaan lain yang terkait. Pembicara pada acara ini adalah pakar dan ahli yang berpengalaman di bidang Instalasi Listrik, dan merupakan penyusun PUIL 2011. Melalui acara ini Ditjen Ketenagalistrikan berharap para stakeholder mendapat informasi dan wawasan baru yang bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan pemasangan instalasi listrik yang sesuai dengan standar dan memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan. (PSJ)

Atas - Melalui Forum PUIL diharapkan para stakeholder mendapatkan informasi dan wawasan baru yang bermanfaat

Tengah - Seorang peserta dalam sesi tanya jawab

Bawah - Peserta berasal dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, PT PLN (persero), civitas akademika, asosiasi, serta perwakilan dari perusahaan lain yang terkait



Inspektur Ketenagalistrikan Diharap Terus Tingkatkan Kompetensi



PT Siemens Indonesia mengundang para inspektur ketenagalistrikan untuk melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas produksi di Pulomas Jakarta dan Cilegon Banten, pada Senin (16/5) hingga Selasa (17/5).

Inspektur ketenagalistrikan diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan terkait dengan teknologi dan isu-isu terkini. Kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana teknologi diterapkan dalam industri ketenagalistrikan merupakan hal penting dan harus terus dilakukan. Untuk itu pemerintah mengapresiasi PT Siemens Indonesia yang mengundang para inspektur ketenagalistrikan untuk melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas produksi di Pulomas Jakarta dan Cilegon Banten, pada Senin (16/5) hingga Selasa (17/5). Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, acara tersebut penting untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor ketenagalistrikan.

Menurut Jarman, acara yang digagas PT Siemens Indonesia dan Inspektur Ketenagalistrikan ini merupakan harmoni antara pemerintah dan industri di sektor ketenagalistrikan.

"Acara hari ini dapat menjadi contoh dari tindak lanjut dari pertemuan penting antara Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Kanselir Jerman, Angela Merkel pada bulan April 2016 untuk memperkuat kerjasama bagi pengembangan sumber daya manusia di sektor kelistrikan di Indonesia," jelas Jarman. Acara ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Workshop Siemens *Power System Planning* di Bekasi tanggal 5-6 April 2016 yang dihadiri oleh 30 inspektur ketenagalistrikan.

Dalam sambutannya Jarman menyampaikan bahwa pembangunan dan pengoperasian infrastruktur ketenagalistrikan memiliki tantangan yang tak terelakkan tentang keselamatan dan keandalan operasi terutama karena meningkatnya jumlah energi terbarukan dalam sistem ketenagalistrikan. Ia menjelaskan bahwa Ditjen Ketenagalistrikan saat ini memiliki 54 orang inspektur ketenagalistrikan yang bertanggung jawab untuk

Warta Kita

Dirjen Ketenagalistrikan Jerman (kedua dari kiri) menyambut baik kunjungan lapangan yang diinisiasi oleh PT Siemens Indonesia.



melakukan inspeksi dan investigasi mengenai keselamatan ketenagalistrikan pada suatu instalasi listrik. "Termasuk instalasi pembangkit listrik, transmisi, gardu, distribusi dan pengguna akhir," jelas Jarman.

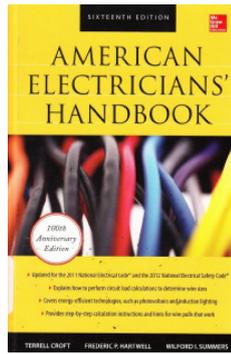
Jarman berharap kunjungan lapangan ini membawa manfaat bagi para inspektur ketenagalistrikan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka. Pihaknya ingin tahu bagaimana Siemens dapat mendukung Pemerintah Jerman dalam mencapai pembangunan energi terbarukan di negara tersebut. Jerman sendiri merupakan salah satu negara dengan komitmen tinggi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Menurut IRENA Report 2015, energi terbarukan Jerman mencapai hingga 25% dari bauran energi di tahun 2014. Jerman juga telah memiliki sebuah patokan internasional tentang bagaimana energi terbarukan dapat diintegrasikan tanpa memunculkan masalah sistemik dalam stabilitas sistem energi.

Melalui kunjungan lapangan ini, Jarman percaya bahwa para inspektur ketenagalistrikan dapat memperoleh pengalaman berharga dan pengetahuan. "Kami sangat mendukung pelaksanaan kunjungan lapangan ke pabrik Siemens, mudah-mudahan kerjasama dapat berlanjut" ungkap Jarman. (PSJ)



Kunjungan lapangan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para inspektur ketenagalistrikan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka.

Resensi Buku

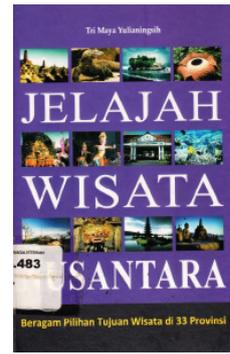


Judul: American Electricians' Handbook
Pengarang: Terrel Croft, Frederic P.Hartwell, Wilford I. Summers
Data Fisik: 23,5 cm, 900 hlm.
Data Terbit: 2013: USA, McGraw-Hill, Inc
Edisi: Sixteenth Edition

Selama satu abad, American Electricians' Handbook menjadi buku acuan dunia industri yang berfungsi sebagai sarana informasi mengenai perancangan, instalasi, operasi, dan pemeliharaan sistem listrik dan peralatannya. Buku edisi ke-16 ini direvisi untuk mematuhi Kode Listrik Nasional 2011 dan Kode Keselamatan Listrik Nasional 2012, serta mencakup teknologi hemat energi saat ini, seperti photovoltaics dan pencahayaan induksi. Rincian foto, diagram, grafik, tabel, dan perhitungan disertakan secara menyeluruh dalam buku ini. Buku ini cukup praktis untuk dimiliki oleh setiap ahli listrik profesional.

Adapun isi buku ini terdiri dari:

1. *Fundamentals*
2. *Properties and splicing of conductors*
3. *Circuits and circuit calculations*
4. *General electrical equipment and batteries*
5. *Transformers*
6. *Solid-state devices and circuits*
7. *Generators and motors*
8. *Outside distribution*
9. *Interior wiring*
10. *Electric lighting*
11. *Optical fiber*
12. *Wiring and design tables*



Judul: Jelajah wisata Nusantara
Pengarang: Tri Maya Yulianingsih
Data Fisik: 21 cm, vi, 442 hlm.
Data Terbit: Yogyakarta, Media Pressindo

Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan 17.000 pulau-pulau yang terhampar lebih dari 5.000 km ke arah timur dari Sabang di utara Sumatra sampai Merauke di Papua. Tak salah kiranya, jika negeri ini sering distilahkan sebagai Untaian Zamrud dari Khatulistiwa.

Mulai dari Bali yang eksotis dengan wisata alam dan religinya sampai Wakatobi sebagai unggulan baru dari Sulawesi Tenggara dengan wisata pantai dan dunia bawah lautnya. Atau, keindahan mahakarya Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko sebagai salah satu warisan budaya dunia. Pucak Jaya, Rinjani, Semeru, Bromo dan lain-lain akan memanjakan Anda yang menyukai wisata petualangan penuh tantangan.

Buku ini berisi referensi wisata di 33 provinsi di Indonesia yang dilengkapi dengan gambar-gambar representatif untuk setiap objek wisatanya. Buku ini dapat dijadikan sebagai pedoman yang akan membantu pembaca dalam menentukan obyek wisata yang akan dikunjungi.

Resensi oleh:
Dina Andriani
Pustakawan Muda

PEMERINTAH MINTA PLN TINJAU KONTRAK PLTD SEWA

Pasokan listrik di Nias, Sumatera Utara sudah kembali normal setelah sempat mengalami krisis listrik. Untuk menghindari kejadian serupa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) mengevaluasi semua kontrak sewa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Hal tersebut ditegaskan Menteri ESDM Sudirman Said saat melakukan kunjungan kerja ke PLTD Idanoi di Nias, Kamis (14/4).

"Karenanya, semua kontrak sewa PLN dengan PLTD harus dievaluasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk lainnya di kemudian hari," ungkapnya.

PLTD Idanoi merupakan pembangkit listrik yang pemasok utama sistem kelistrikan Nias. PLTD ini menghasilkan 10 MW listrik yang dieselnya disewa dari PT Amerika Power Rent (APR). PT APR juga mensuplai energi untuk PLTD Moawo 10 MW di Nias. Dari 2 (dua) PLTD tersebut, PT APR mensuplai 20 MW listrik di Nias, sedangkan total suplai listrik di Kepulauan Nias adalah sebesar 26 MW. Sehingga ketika PT APR memberhentikan suplainya, lebih dari 90% Nias gelap gulita.

Dalam kunjungannya Sudirman mengungkapkan bahwa keadaan di Nias memang sudah sulit, apalagi tanpa listrik maka keadaan akan menjadi sulit. "Sejak awal saya katakan kita mesti ke Nias, hanya masalah waktu. Sekaligus memonitor yang dikerjakan PLN," papar Sudirman menjelaskan keinginannya meninjau kondisi listrik di Nias.

Penanggulangan krisis listrik di Nias merupakan kerja keras dari berbagai pihak, baik dari PLN, Pemda, Pemangku kepentingan dan masyarakat. Sebagai aksi konkrit, PLN telah mendatangkan 46 genset milik PLN dari berbagai daerah. Selain itu PLN juga telah menyusun langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang guna menghindari keadaan krisis terulang.

Hal pertama yang dilakukan PLN adalah melakukan pemulihan kemudian langkah berikutnya akan memasang genset yang dari langsa 8 MW. Selanjutnya PLN akan membangun pembangkit 25 MW yang mesinnya dari General Electric (GE), saat ini PLN sedang mengurus perijinannya

termasuk amdalnya yang di prediksi akhir agustus bisa selesai. Keempat, PLN akan membangun transmisi mulai dari Gunung sitoli sampai teluk dalam, dilanjutkan dari gunung sitoli ke nias utara. Sehingga nantinya dari utara ke selatan akan tersambung.

"Saya targetnya tahun 2017 akan selesai" ungkap Direktur Bisnis Wilayah Sumatera PT PLN (Persero) Amir Rosidi.

Sudirman Said mengatakan, pemerintah mengapresiasi gerak cepat PT PLN dalam mencari solusi menangani krisis listrik di Nias. Ia meminta masyarakat memahami kondisi bahwa PLN sebagai korporasi tentunya membutuhkan hitungan untuk menangani permasalahan listrik saat ini.

"Kita tidak ingin ini terjadi lagi, PLN sudah menyusun langkah pencegahan agar kejadian ini tidak terulang. Pemerintah akan beri perhatian khusus, penangan kemarin baru solusi jangka pendek. Ke depan kita akan siapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan listrik di Nias." tegas Sudirman. (PSJ)

Pastikan Keandalan Pasokan Daya Listrik, Dirjen Ketenagalistrikan Kunjungi Nias



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman meninjau PLTD Moawo dan pengatur distribusi di Moawo Nias untuk memastikan kecukupan pasokan daya listrik bagi masyarakat setempat, Kamis (26/5)

Guna memastikan kondisi kelitrikan di Pulau Nias, Sumatera Utara, pada hari Kamis (26/5), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman melakukan kunjungan lapangan ke Pulau yang terletak di sebelah barat Sumatera tersebut. Dalam kunjungannya, Jarman melakukan pemantauan progres pembangunan dan pemasangan PLTD Sewa Idanoi (12 MW) dan PLTD Sewa Idanoi (6 MW). Ia juga melakukan kunjungan ke PLTD Moawo dan pengatur distribusi di Moawo untuk memastikan kecukupan pasokan daya listrik bagi masyarakat setempat. Pemerintah melalui Kementerian ESDM ingin memastikan bahwa tidak ada lagi pemadaman bergilir di Pulau Nias.

Dalam kunjungannya, Jarman didampingi beberapa pejabat dan inspektur ketenagalistrikan di Kementerian ESDM. Hadir pula dalam kunjungan tersebut Kepala Divisi Operasi Regional Sumatera PT PLN (Persero), GM Wilayah Sumatera Utara PT PLN (Persero) dan jajaran PT PLN (Persero) Area Nias.

Saat ini, sistem kelistrikan Pulau Nias memiliki beban puncak 25,97 MW dengan total daya mampu pembangkit 40,2 MW yang disuplai dari PLTD Moawo, PLTD Teluk Dalam serta PLTD Sewa tersebar di Moawo, Idanoi dan Teluk Dalam. Oleh karena itu cadangan sistem Pulau Nias saat ini mencapai 14,23 MW.

Warta Kita



Dalam kunjungannya, Dirjen Ketenagalistrikan meminta PT. PLN (Persero) segera menyelesaikan pemasangan PLTD Sewa Idanoi (12 MW dan 6 MW) serta PLTD Teluk Dalam (6 MW).

Untuk meningkatkan pasokan daya listrik di Pulau Nias, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM meminta PT. PLN (Persero) segera menyelesaikan pemasangan PLTD Sewa Idanoi (12 MW dan 6 MW) serta PLTD Teluk Dalam (6 MW). PT PLN (Persero) sendiri telah menyiapkan operasi mobile genset sebanyak 39 unit dengan rata-rata kapasitas 100 kVA per unit yang disiagakan pada jaringan SUTM 20 kV dan mengoperasikan unit-unit mesin cadangan pada PLTD Sewa.

Menurut Jarman, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan terus menempatkan Inspektur Ketenagalistrikan dan pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di Pulau Nias untuk mengawasi progres pembangunan PLTD Sewa sampai dengan selesai.

Sebagai informasi, PT PLN (Persero) Area Nias telah memberikan kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) terhadap 69.504 pelanggan akibat dampak pemadaman listrik bulan April lalu. Besaran kompensasi yang diberikan kepada pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2014. Kompensasi TMP juga akan diberikan kepada pelanggan akibat dampak pemadaman listrik bulan Mei 2016. (PSJ)

Dirjen Ketenagalistrikan Dampingi Menteri KeTTHA Malaysia Kunjungi Bengkayang



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman mewakili Menteri ESDM mendampingi Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) Malaysia, YB. Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili dalam kunjungan kerja meninjau implementasi proyek infrastruktur transmisi tenaga listrik di wilayah perbatasan antara Bengkayang (Indonesia) – Mambong (Malaysia) Senin (10/5).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman mewakili Menteri ESDM mendampingi Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) Malaysia, YB. Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili dalam kunjungan kerja meninjau implementasi proyek infrastruktur transmisi tenaga listrik di wilayah perbatasan antara Bengkayang (Indonesia) – Mambong (Malaysia) Senin (10/5) di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kunjungan tersebut Maximus didampingi oleh YBhg Dato' Dr. Nadzri bin Yahaya, Deputy Sekjen KeTTHA; YBhg Datuk Daniel Kinsik, Political Secretary untuk Menteri KeTTHA; YBhg Dato' Joseph Salang Gandum, anggota parlemen Malaysia Nick Wright Wakil Presiden dari CEO bidang Kantor dan Pengembangan Usaha SEB; dan Threnes Voo, Petugas

Relasi Media SEDA. Selain disambut oleh Kementerian ESDM, rombongan juga disambut oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, dan Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Djoko Abumanan.

Dalam pertemuan bilateral antar kedua negara, Jarman menyampaikan bahwa Indonesia akan bertindak selaku tuan rumah pelaksanaan Pertemuan Perdana *Joint Technical Committee* antara Indonesia dan Malaysia terkait Proyek Interkoneksi Lintas Batas di bawah *ASEAN Power Grid* (APG). Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari MOU yang telah ditandatangani kedua Menteri pada tanggal 12 Februari 2016 di sela *Bali Clean Energy Forum* (BCEF) di Nusa Dua, Bali. Secara terpisah, PLN, Tenaga Nasional Berhad (TNB),

Warta Kita



Kondisi listrik di Kalimantan Barat lebih stabil dengan adanya kerjasama Indonesia dan Malaysia di sektor ketenagalistrikan

Sarawak Energy Berhad (SEB) dan Sabah Electricity (SESB) secara aktif juga melangsungkan pertemuan membahas hal-hal teknis terkait administratif, legalitas, finansial, teknikal dan manajemen resiko secara Business to Business (B2B).

Jarman mengungkapkan apresiasi pemerintah Indonesia terhadap kunjungan delegasi Malaysia. "Kami merasa bangga atas lawatan kerja Menteri Malaysia ke Bengkayang," tutur Jarman. Ia menambahkan kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak dalam membantu memenuhi pasokan listrik di masing-masing negara melalui interkoneksi Kalimantan dengan Serawak. "Akan memungkinkan untuk menjajaki kerja sama lain di sektor energi," harap Jarman.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri KeTTHA Malaysia. Ia memberikan apresiasi atas kerja sama yang sudah dibangun sejak Januari 2016. "Ini permulaan kerja yang terberat di bidang energi. Kerja sama ini bisa mengatasi masalah listrik bukan sekadar perkara-perkara yang biasa," kata Maximus saat pertemuan bilateral dengan jajaran pemerintah Indonesia.

Adanya kerja sama ini banyak memberikan keuntungan bagi kebutuhan listrik Kalimantan Barat. Hal ini diakui oleh Direktur Bisnis Regional mengakui kelistrikan Kalimantan, Djoko Rahardjo Abumanan, mengenai kondisi listrik di wilayah tersebut. "Bisa diamati sejak Januari, listrik di Kalbar jarang byar pet," ungkap Djoko. (PSJ)



Kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak (Indonesia dan Malaysia) dalam membantu memenuhi pasokan listrik di masing-masing negara melalui interkoneksi Kalimantan dengan Serawak.

Tips



Sumber gambar: Google.

Tips Membuat Slide Presentasi yang EFEKTIF

Pernahkah anda datang ke suatu seminar dimana pembicara menggunakan slide presentasi yang penuh dengan tulisan? Bahkan font nya dibuat kecil agar semua tulisan cukup masuk dalam slide tersebut. Bagaimana pendapat anda mengenai slide tersebut? Tentu sebagian besar dari anda akan mengatakan bahwa slide tersebut membosankan dan cenderung membuat anda tidak terlalu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pembicara.

Slide presentasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung anda menyampaikan suatu pesan yang ingin anda sampaikan. Tentunya cara anda menyampaikan pesan kepada audiens adalah hal utama agar pesan tersampaikan, namun dengan slide presentasi yang baik, audiens akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan pesan yang disampaikan tersebut. Berikut disampaikan beberapa tips

untuk membuat slide presentasi yang baik.

1. Buat *opening slide* sebaik mungkin

Slide pembuka yang menjadi awal presentasi adalah kesempatan anda untuk menarik perhatian audiens. Gunakan tulisan disertai dengan gambar yang unik, menarik, dan warna yang mengundang perhatian. Buat audiens penasaran dengan isi dari slide berikutnya.

2. Gunakanlah kata kunci dan gambar

Buatlah kata-kata kunci dari pesan yang anda ingin sampaikan disertai dengan gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Hal ini membuat audiens mudah memahami dan mudah mengingat apa yang anda sampaikan.

Tips

3. Meringkas teks

Jangan sampaikan penjelasan melalui tulisan yang panjang dalam sebuah slide. Tulisan yang panjang dan bertele-tele akan membuat audiens cepat merasa bosan.

4. Gunakan font yang tepat

Presentasi anda dilihat oleh seluruh audiens, baik yang posisinya dekat ke layar presentasi maupun posisi paling jauh dari layar. Pastikan teks digunakan dengan tepat dan mudah dibaca. Gunakan ukuran font yang cukup besar sehingga tetap terlihat dengan baik oleh audiens yang duduk di kursi paling belakang sekalipun.

5. Tambahkan video

Sesekali tambahkan video dalam slide presentasi anda agar audiens tidak merasa jenuh. Pastikan video yang anda tambahkan sudah sesuai dengan materi. Perhatikan juga durasi penayangan video, sebaiknya jangan terlalu lama atau terlalu sebentar.

7. Buat slide yang interaktif

Buat slide presentasi anda terasa lebih hidup dengan menambahkan efek-efek pada tulisan, gambar dan transisi setiap pada tiap slidanya sehingga presentasi anda lebih terlihat interaktif. Masukkan juga kalimat-kalimat yang mengandung unsur pertanyaan kepada audiens sehingga mereka merasa dilibatkan untuk aktif bersama anda.

8. Sederhana

Penggunaan warna yang terlalu mencolok, gambar yang terlalu banyak dan efek yang terlalu berlebihan juga kurang baik untuk slide presentasi anda. Usahakan slide presentasi anda dibuat dengan sederhana tapi tetap menarik.

Dengan slide presentasi yang baik, akan membuat audiens merasa tertarik dengan apa yang akan anda sampaikan. Jadi, anda juga harus menjelaskan pesan yang ingin anda sampaikan dengan baik dan semenarik mungkin dengan bantuan slide presentasi tersebut. Selamat mencoba! (UH)

Sumber gambar: Google.



6. Perhatikan warna latar belakang

Sesuaikan warna latar belakang slide dengan pemilihan warna teks atau gambar dalam slide anda. Usahakan warna yang digunakan kontras sehingga keterbacaannya menjadi jelas. Misalnya jangan gunakan latar belakang warna hitam dengan teks berwarna biru tua.

Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Pembukaan The 3rd ISES 2016



Sumber gambar: themalaysianreserve.com

ISES ke-3 tahun 2016 menampilkan sejumlah tokoh dan profesional bidang energi dari berbagai organisasi dan lembaga yang membahas pemanfaatan energi terbarukan untuk menjamin demokratisasi penyediaan tenaga listrik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman mewakili Menteri ESDM menghadiri pembukaan dan bertindak selaku Keynote Panelist pada Forum *The 3rd International Sustainable Energy Summit* (ISES) 2016. Acara yang diselenggarakan Selasa (5/4) di Putrajaya Marriott Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia ini dibuka oleh Yang Berhormat Dato Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili, Minister of Energy, Green Technology and Water (Kementerian Tenaga, teknologi Hijau dan Air -KeTTHA), Malaysia.

Forum dua tahunan ISES ke-3 tahun 2016 ini sendiri berlangsung hingga Rabu (6/4) dan menampilkan sejumlah tokoh dan profesional bidang energi dari berbagai organisasi dan lembaga yang membahas pemanfaatan energi terbarukan untuk menjamin demokratisasi penyediaan tenaga listrik. ISES ke-3 2016 diselenggarakan oleh Sustainable Energy Development Authority (SEDA) Malaysia, di mana ISES ke-1 diselenggarakan sebagai forum berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk memenuhi *the Strategic Thrust 5 of the National*

Renewable Energy Policy and Action Plan (NREPAP) Malaysia.

ISES ke-3 tahun 2016 mengangkat tema *Democraticising Electricity Supply*. Tema ini sebagai simbol kedewasaan sistem pasukan tenaga listrik sebagai pilihan bagi konsumen dan penghargaan bahwa akses listrik merupakan kebutuhan dasar manusia. Pembicara dalam ISES ke-3 tahun 2016 adalah profesional di bidang pemanfaatan energi terbarukan dan bidang terkait.

Menteri KeTTHA DR. Maximus

Warta Kita

menyatakan dalam kerangka melaksanakan Rencana ke-11 telah mengidentifikasi pentingnya akses energi untuk seluruh bangsa pada tahun 2020, dan serius mengejar target Malaysia menjadi negara yang aktif menggunakan energi bersih dan hijau, bahkan mengancam tidak ragu akan mencabut proyek yang telah diberikan oleh Pemerintah Malaysia kepada Pengembang yang gagal melaksanakan proyek energi terbarukan dengan mekanisme *Feed-in Tariff* (FIT). SEDA Malaysia bertugas memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

Malaysia telah memasukkan *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) yang lebih rendah daripada *the Paris Agreement* di mana Pemerintah Malaysia telah menetapkan target ambisius pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (*Greenhouse Gas* -GHG) GDP 45% pada tahun 2030 relatif terhadap intensitas emisi tahun 2005. Pencapaian target 35% atas unconditional basis, dengan tambahan 10% conditioned dari iklim finansial dan dukungan negara maju. Ini adalah janji, yang tersurat dalam the 11MP to decarbonise the economy.

Dalam kesempatan selanjutnya, Jarman menyampaikan Aksi Indonesia untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di sektor Ketenagalistrikan. Dalam paparannya Jarman menekankan tujuan penyediaan tenaga listrik yang cukup jumlahnya, bagus kualitasnya dan terjangkau harganya, untuk itu energi primer harus dimanfaatkan secara optimal sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional, termasuk dengan prioritas pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Jarman kemudian memaparkan kondisi sistem ketenagalistrikan Indonesia dimana Rasio Elektrifikasinya masih 88,30% dan memerlukan tambahan pasokan

tenaga listrik. Untuk itu, program infrastruktur ketenagalistrikan 35 GW merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa Indonesia.

Dalam kerangka mengurangi efek Gas Rumah Kaca khususnya dari pertambahan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, Pemerintah Indonesia berkomitmen 'mengunci' bauran energi batubara dalam pembangkitan tenaga listrik maksimum 50% pada tahun 2025 dari status 53% pada tahun 2014, menetapkan persentase bauran gas yang sama 24% antara tahun 2014 dan 2025, menekan bauran Minyak Bumi hingga hanya maksimal 1% dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan dari 12% di tahun 2014 menjadi 25% pada tahun 2025. Khusus untuk Batubara, saat ini Pemerintah mendorong pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar Batubara menggunakan teknologi ramah lingkungan, bahkan telah mewajibkan untuk PLTU Batubara berkapasitas lebih dari 600 MW menggunakan teknologi Super Critical (SC), dan PLTU Batubara berkapasitas lebih dari 1.000 MW wajib menggunakan teknologi Ultra Super Critical (USC).

Seusai Pembukaan Forum ISES ke-3 dan menjadi salah satu Keynote Panelist, selanjutnya Jarman didampingi oleh perwakilan PT. PLN (Persero), pejabat dan staf Ditjen Ketenagalistrikan serta didampingi KBRI Kuala Lumpur menghadiri pertemuan bilateral Indonesia – Malaysia. Pertemuan ini diinisiasi oleh Malaysia dalam rangka menindaklanjuti pernyataan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia dan Menteri Tenaga, Tenaga Hijau dan Air (KeTTHA) Malaysia pada tanggal 12 Februari 2016 di Nusa Dua, Bali terkait pembentukan komite teknis bersama antara kedua negara untuk percepatan pelaksanaan

proyek interkoneksi antar kedua negara di bawah kerangka *ASEAN Power Grid* (APG).

Delegasi Malaysia dipimpin oleh Sekjen Kementerian KeTTHA, Datuk Loo Took Gee dan didampingi perwakilan KeTTHA, Energy Commission, TNB, SESB, serta SESCO. Pertemuan membahas 3 (tiga) proyek interkoneksi antar kedua negara, yaitu:

a.The Peninsular Malaysia (Malacca) – Sumatera (Pekanbaru);
b.Sarawak (Kuching) – West Kalimantan (Pontianak); dan
c.Sabah (Tawau) – Kalimantan Utara (Tarakan).

Pertemuan juga membahas keanggotaan komite teknis, di mana Malaysia telah menyusun keanggotaan komite teknis. Selanjutnya kedua pihak menyepakati pertemuan pertama Komite Teknis Bersama akan berlangsung di Indonesia dan waktu pelaksanaannya diharapkan berlangsung dalam Bulan Mei 2016 sebelum Bulan Ramadhan.

Kedua pimpinan delegasi mengharapkan hasil pertemuan tim teknis selanjutnya dapat dilaporkan pada pertemuan the 34th *ASEAN Senior Official Meeting on Energy* (SOME) pada tanggal 12 – 15 Juli 2016 dan pertemuan the 34th *ASEAN Ministers on Energy Meeting* (AMEM) tanggal 19 – 23 September 2016 yang keduanya akan berlangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Ditjen Ketenagalistrikan Meriahkan Pekan Inovasi Sumut

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bergabung dalam stan Kementerian ESDM memeriahkan Pekan Inovasi Sumatera Utara yang digelar di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (19/5) hingga Minggu (22/5). Pameran yang dihadiri instansi pemerintah pusat dan daerah se-Sumatera Utara, BUMN dan BUMD dan swasta ini mengangkat tema peningkatan inovasi dan kreativitas guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dalam sambutan pembukaan pameran tersebut, Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengungkapkan bahwa MEA merupakan momentum untuk meningkatkan kapasitas lokal dan nasional. "MEA yang dimulai Desember 2015 di mana seluruh negara-negara ASEAN melakukan kegiatan

ekonomi secara bebas yang otomatis membuat produk asing semakin banyak beredar dengan harga murah di dalam negeri hanya bisa diatasi dengan produk yang memiliki keunggulan," kata Erry.

Peningkatan inovasi dan kreatifitas sangat penting mengingat perlunya pertumbuhan ekonomi Sumut serta tugas untuk merealisasikan investasi sebesar Rp11 triliun pada tahun ini, Menurut, pertumbuhan ekonomi Sumut yang masih melambat di triwulan I 2015 harus ditingkatkan. Sementara target realisasi investasi Rp11 triliun juga harus bisa dicapai bahkan kalau memungkinkan berada di atasnya. Sumut menurutnya harus bisa mempertahankan menjadi salah satu daerah pemberi kontribusi pertumbuhan ekonomi



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bergabung dalam stan Kementerian ESDM memeriahkan Pekan Inovasi Sumatera Utara yang digelar di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (19/5) hingga Minggu (22/5).

Warta Kita



Seorang petugas pameran dari Ditjen Ketenagalistrikan sedang memberikan penjelasan pada pengunjung.

nasional dan masuknya sebagai 10 provinsi terbesar dalam pencapaian realisasi investasi PMA dan PMDN. "Pekan Inovasi Sumut yang dilakukan terjadwal tiap tahun harus didukung semua kalangan agar benar-benar menjadi pendorong ekonomi Sumut," kata Erry.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mencanangkan beberapa program diantaranya program 35.000 MW yang ditargetkan selesai tahun 2019. Pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi serta distribusinya membutuhkan investasi dari swasta melalui mekanisme *Independent Power Producers (IPP)*. Swasta juga dilibatkan dalam usaha penunjang tenaga listrik seperti peralatan pendukung, keterlibatan dalam penelitian dan pengembangan, serta peningkatan sumber daya manusia di sektor ketenagalistrikan. Hal-hal tersebut ditampilkan dalam stan Kementerian ESDM di pameran ini.

Pekan inovasi ini selain menampilkan beberapa program pemerintah juga bisa dijadikan momentum memasarkan produk-produk strategis dan potensial karya pengusaha lokal dan dalam negeri lainnya. Bahkan pagelaran dalam pameran ini bisa menjadi media publikasi dan promosi seni dan budaya serta meningkatkan kreatifitas masyarakat luas dan termasuk pemerintah daerah. Kegiatan yang diikuti 80 peserta termasuk dari kementerian/lembaga Pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di luar Sumut, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, dan perusahaan swasta itu terlihat ramai dikunjungi masyarakat. (PSJ)



*Atas - Seorang pengunjung tengah membaca bahan yang dipamerkan pada stan Kementerian ESDM di Pekan Inovasi Sumatera Utara.
Bawah - Karnaval peragaan busana sebelum mengawali pameran.*

Kebijakan Pelayanan Ketenagalistrikan

Disosialisasikan di Makassar

Listrik telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, untuk itu pelayanan ketenagalistrikan menjadi salah satu isu penting. Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan cq. Subdit Perlindungan Konsumen Listrik menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di Hotel Santika, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (26/5).

Acara dibuka oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Satya Zulfanita. Hadir sebagai narasumber Kasubdit Perlindungan Konsumen Tenaga Listrik Ridwan Dumroh, Kasubdit Tarif dan Subsidi Tenaga Listrik Jisman Hutajulu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Manajer Bidang Niaga PT PLN (Persero) Distribusi Wilayah Sulselrabar Riza Novianto, serta Manager Senior Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Pusat Mukhtar.

Dalam sambutannya, Satya berpesan bahwa peningkatan pelayanan oleh PLN tidak hanya menguntungkan konsumen akan tetapi juga menguntungkan PLN secara korporasi. Dengan menyalurkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik berarti PLN mendapatkan penjualan listrik secara terus menerus dan tidak kehilangan penjualan akibat dari pemadaman listrik yang dirasakan oleh konsumen.

Menurut Satya, peningkatan pelayanan juga terkait dengan peringkat indikator *getting electricity* yang merupakan salah satu indikator pada *ease of doing business* Indonesia yang diharapkan semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012 *getting electricity* Indonesia adalah 161 dari 189 negara, pada tahun 2013 meningkat menjadi peringkat 147, tahun 2014 peringkat 101, tahun 2015 peringkat 78 dan pada tahun 2016 peringkat 46. Dengan perbaikan pelayanan, diharapkan pada tahun 2017 peringkat Indonesia menanjak menjadi peringkat 24 dunia. "Peningkatan peringkat *getting electricity* menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap investasi," jelas Satya.

Dalam paparannya Ridwan Dumroh menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen listrik dan kewajiban bagi PT. PLN (Persero) di bidang pelayanan ketenagalistrikan. Hak dan kewajiban konsumen listrik telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ridwan juga menyampaikan bahwa sesuai Permen 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Permen 33 Tahun 2014 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017, PT. PLN (Persero) wajib untuk memberikan kompensasi sebesar 20% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik dan 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik bagi konsumen yang terkena lama atau jumlah pemadaman listrik (lama gangguan dan jumlah gangguan) melebihi yang dijanjikan PT. PLN (Persero), juga untuk indikator pinalti Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang lain, yaitu untuk indikator kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter dan waktu koreksi rekening.

Lebih lanjut Ridwan memaparkan bahwa pada tahun 2015, PT. PLN (Persero) di Wilayah Sulselrabar telah memberikan kompensasi sebesar Rp 5.130.566.155 untuk 783.140 pelanggan, adapun kompensasi untuk seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp 79.344.424.274 untuk 7.583.782 konsumen.

Sementara itu, Jisman Hutajulu menjelaskan mengenai kebijakan Pemerintah terkait tarif dan subsidi listrik dimana pemerintah berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu. Ia menyampaikan bahwa subsidi listrik akan tetap ada, namun diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu, sementara tarif untuk konsumen lainnya ditetapkan sesuai keekonomian secara bertahap. D

Dalam menerapkan tarif kepada konsumen PT. PLN



Narasumber Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di Hotel Santika, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (26/5). Kasubdit Perlindungan Konsumen Tenaga Listrik Ridwan Dumroh (Tengah) menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen listrik

(Persero), Pemerintah harus memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat. Kasubdit Tarif dan Subsidi Tenaga Listrik ini juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 terdapat 12 golongan tarif non subsidi yaitu R1 1300VA dan 2200VA, R2, R3, B2, B3, I3, I4, P1 6600VA ke atas, P2, P3 dan Layanan Khusus (L). Untuk ke 12 golongan tarif tersebut, fluktuasi BPP karena faktor yang bersifat uncontrollable (kurs, inflasi, ICP) tidak dibebankan pada subsidi, namun dibebankan kepada pelanggan non subsidi melalui mekanisme tariff adjustment.

Narasumber dari PT PLN (Persero) Pusat, Mukhtar menyampaikan presentasi berjudul Tariff Adjustmengg dan Layanan Tanpa Batas. Ia menjelaskan Tariff Adjustmengg yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) dan upaya transformasi yang menjadikan layanan PT. PLN (Persero) tanpa batas ruang dan waktu dengan program-program contact center 123, satu pintu gerbang interaksi komunikasi dengan pelanggan, satu aplikasi terpusat dan area layanan yang terpadu. Sementara itu narasumber dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, Riza Novianto, sebagai tuan rumah menjelaskan program-program unggulan yang ada di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.

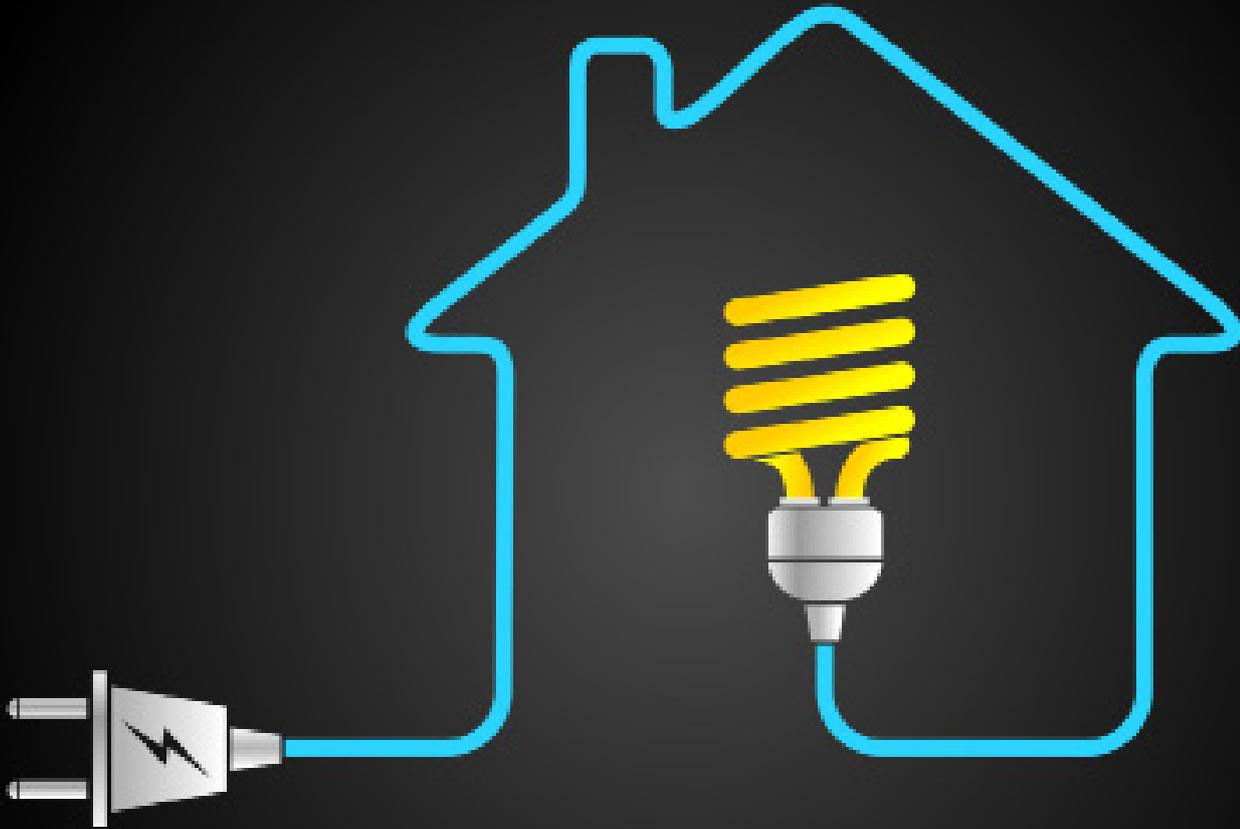
Sebagai narasumber penutup adalah Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Menurut data aduan yang masuk ke YLKI selama tahun 2015, beberapa hal yang diadukan oleh Konsumen di Indonesia adalah Mayoritas mengenai operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero); Masih seringnya pemadaman listrik khususnya yang terjadi di luar pulau Jawa; Pemaksaan penggunaan meteran listrik pra bayar serta Masalah SLO (dugaan adanya SLO abal-abal dan ada tarif tambahan). Sosialisasi tersebut diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi dengan peserta. (FR/AJT/PSJ)

Daftar Legislasi dan Regulasi Koleksi Perpustakaan DJK

Bulan Januari – Juni 2016

oleh: Dina Andriani (Pustakawan Muda)

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK
1.	Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
2.	Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar
3.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengakuan Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang Diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Terdaftar di ASEAN
4.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Asesor Ketenagalistrikan
5.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
6.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
7.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
8.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
9.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
10.	Keputusan Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016 s.d. 2025



Peralatan listrik ber-SNI
dijamin AMAN,
membuat hidup menjadi nyaman

WASPADA KEBAKARAN



Hindarkan !

Rumah Anda dari Bahaya Kebakaran . . .

Pastikan Rumah Anda Memiliki SLO.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 256044
www.djk.esdm.go.id